



BUKU I ANALISIS STRATEGIS SMART CITY

Pemerintah Kabupaten Bantul

KATA PENGANTAR

Buku 1: Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari keempat Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul. Buku ini berisikan analisis dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan *Smart City* sebagai dasar dalam menyusun strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada di Kabupaten Bantul. Buku ini terdiri dari analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, analisis strategi pembangunan *Smart City*, serta analisis visi pembangunan *Smart City*.

Bab pertama analisis masa depan berisikan komponen analisis visi pembangunan, analisis tren pembangunan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan *law/legal*. Pada bab kedua yaitu analisis kesiapan daerah dilakukan analisis kondisi sumber daya alam (*nature*), struktur, infrastruktur, suprastruktur, dan *culture*. Sedangkan, untuk analisis strategi pembangunan *Smart City* dilakukan dengan menggunakan analisis GAP, SWOT, dan TOWS untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya pada bab terakhir, ditutup dengan analisis visi pembangunan *Smart City* yang terdiri dari visi misi *Smart City* dan sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul. Dokumen Analisis Strategis Masterplan *Smart City* diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul.

Buku 1: Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul diharapkan dapat menjadi dokumen acuan awal dalam penyusunan ketiga buku lainnya sehingga tercipta integrasi dan sinkronisasi antar buku. Selain itu buku ini dapat dijadikan sebagai analisis kesiapan daerah dalam mengimplementasikan *Smart City* yang efektif, efisien, dan *sustainable*.

Tim Penyusun Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
ANALISIS MASA DEPAN	5
1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah	5
1.2 Analisis Kondisi Eksternal	16
1.2.1 Analisis Tren Pembangunan Politik	16
1.2.2 Analisis Tren Pembangunan Ekonomi	18
1.2.3 Analisis Tren Pembangunan Sosial	19
1.2.4 Analisis Tren Pembangunan Teknologi	21
1.2.5 Analisis Tren Pembangunan Lingkungan	22
1.2.6 Analisis Tren Pembangunan <i>Law/Legal</i>	24
BAB II	
ANALISIS KESIAPAN DAERAH	26
2.1 <i>Nature</i>	26
2.2 Struktur	28
2.2.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia	28
2.2.2 Kemampuan Birokrasi	34
2.2.3 Kemampuan Anggaran	38
2.3 Infrastruktur	42
2.3.1 Fisik	42
2.3.2 Digital	48
2.3.3 Sosial	50
2.4 Suprastruktur	52
2.4.1 Kebijakan	52
2.4.2 Kelembagaan	55
2.5 <i>Culture</i>	60
BAB III	
ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN <i>SMART CITY</i>	63
3.1 Analisis GAP	63
3.2 Analisis SWOT	67
3.2.1 Analisis SWOT <i>Smart Governance</i>	67
3.2.2 Analisis SWOT <i>Smart Branding</i>	69
3.2.3 Analisis SWOT <i>Smart Economy</i>	70
3.2.4 Analisis SWOT <i>Smart Living</i>	72
3.2.5 Analisis SWOT <i>Smart Society</i>	74
3.2.6 Analisis SWOT <i>Smart Environment</i>	76

3.3 Analisis TOWS	78
3.3.1 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Governance</i>	78
3.3.2 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Branding</i>	80
3.3.3 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Economy</i>	81
3.3.4 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Living</i>	83
3.3.5 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Society</i>	85
3.3.6 Analisis Kesenjangan terkait <i>Smart Environment</i>	87
BAB IV	
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY	89
4.1 Visi, Misi, <i>Smart City</i>	89
4.2 Sasaran <i>Smart City</i> Daerah	90
REFERENSI	94

BAB I

ANALISIS MASA DEPAN

Analisis masa depan *Smart City* meliputi analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota. Analisis masa depan pada BAB I digambarkan oleh hasil analisis visi pembangunan daerah dan analisis kondisi eksternal. Analisis visi pembangunan daerah berisikan hasil analisis dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul yang disinkronkan dengan dimensi *Smart City*. Lebih jauh, analisis tren kondisi eksternal terdiri dari analisis tren pembangunan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta *law/legal*. Analisis masa depan diharapkan dapat memberikan gambaran masa depan Kabupaten Bantul dalam mewujudkan dan menerapkan setiap aspek dalam *Smart City*.

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Secara konteks geografis, Kabupaten Bantul mencakup wilayah seluas 511,706 km² yang setara dengan sekitar 16,33% dari keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, berdasarkan aspek administratifnya, Kabupaten Bantul memiliki batasan geografis dengan entitas tetangga yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Utara: berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;
- Selatan: berbatasan langsung dengan Samudera Hindia;
- Barat: berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman;
- Timur: berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul.

Secara umum, Kabupaten Bantul terdiri dari 75 kalurahan, 933 padukuhan, dan 17 kapanewon, dengan jumlah kalurahan dan dusun terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu sebanyak 8 kalurahan dan 72 padukuhan (BPS Kabupaten Bantul, 2023). Sementara itu, Kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yang hanya memiliki dua kalurahan dan 43 padukuhan. Merujuk pada penggolongan wilayahnya, kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan menjadi 41 kalurahan pedesaan (*rural area*) dan 34 kalurahan perkotaan (*urban area*).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki komitmen untuk berkembang menjadi kabupaten cerdas yang mampu memenuhi dan meminimalisir permasalahan kabupaten dengan cara dan solusi alternatif sehingga mampu melayani masyarakat lebih baik, tercapainya kehidupan yang nyaman dan aman bagi masyarakat dan berkelanjutan. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyusun Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul. Penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul tentunya perlu berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, seperti: dokumen RPJPD Kabupaten Bantul, RPJMD Kabupaten Bantul, RTRW Kabupaten Bantul, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta perencanaan lain yang memiliki korelasi dengan RPJMD. Konsistensi pembangunan yang berfokus pada sasaran dapat menjamin terwujudnya visi pembangunan daerah. Merujuk pada visi Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”

Langkah untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul kemudian diturunkan ke dalam beberapa misi, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana; dan
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara aktif mendorong pembangunan dan pertumbuhan wilayahnya melalui adopsi teknologi dan sistem yang efisien, efektif, transparan, dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi melalui inisiatif Bantul *Smart City*. Hal ini terbukti dari berbagai prestasi yang diperoleh Kabupaten Bantul dimana Kabupaten Bantul telah berhasil menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/Kota di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan sukses. Lebih jauh, pada Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul meraih predikat “Sangat Baik” dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3.62. Berbagai prestasi yang telah diperoleh Kabupaten Bantul tidak menurunkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan aspek-aspek kecerdasan kabupaten di seluruh dimensi, khususnya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Oleh karena itu, pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan kembali Masterplan *Smart City* Tahun 2024-2028 dengan cakupan pengumpulan inovasi sampai pada tingkat kalurahan.

Bantul *Smart City* merupakan salah satu cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan *Smart Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. Pengembangan *Smart Governance* diarahkan pada penyediaan layanan unggulan yang dikenal sebagai *Digital Government Services (DGS)*. Implementasi konsep *Smart City* Kabupaten Bantul perlu diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD. Adapun hasil sinkronisasi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Bantul sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan Dimensi *Smart City*

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks tata kelola pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks tata kelola pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	✓					
2	Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur harapan hidup					✓	
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka harapan lama sekolah						

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan turunnya	Jumlah masyarakat kurang mampu	Angka kemiskinan			✓			
			Pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi						
					<i>Gini ratio</i>						
				Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan						
				Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif						
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan										

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
					Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura						
					Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan						
					Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)						
				Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan						
4	Peningkatan	Menjaga daya	Indeks kualitas	Terpenuhinya	Indeks				✓		✓

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	lingkungan hidup	sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur						
				Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup						
				Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa tangguh bencana						
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang						
5	Penanggulang-	Mewujudkan	Angka	Terwujudnya	Angka		✓			✓	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	an masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Kriminalitas	ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kriminalitas						
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks pembangunan kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks pembangunan kebudayaan						

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Masterplan *Smart City* Kabupaten Bantul tidak hanya sebatas pada sinkronisasi misi, tujuan, dan sasaran dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 namun juga selaras dengan semboyan Kabupaten Bantul yaitu Projotamansari. Semboyan Projotamansari menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari karakteristik di wilayah Kabupaten Bantul. Kata Projotamansari dimaknai sebagai etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Adapun secara rinci penjabaran semboyan Projotamansari sebagai berikut.

1. PRODUKTIF

semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah

2. PROFESIONAL

Tolok ukur profesional dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dengan efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

3. IJO ROYO-ROYO

Kabupaten Bantul sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

4. TERTIB

setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib secara pasti, perpedoman

pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

5. AMAN

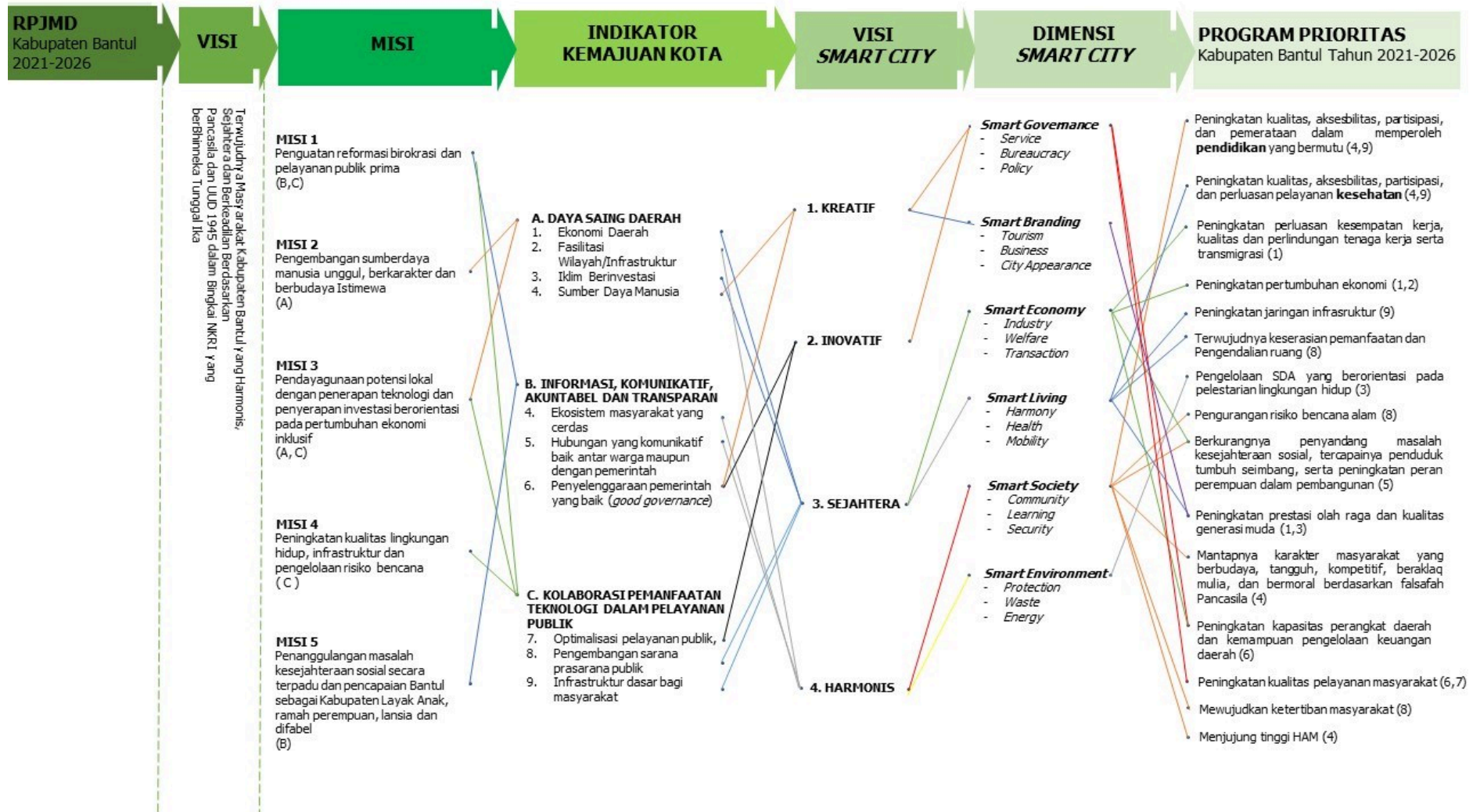
terwujudnya tertib pemerintah dan tertib kemasyarakatan yang membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat guna mendukung stabilitas daerah.

6. SEHAT

tertibnya lingkungan hidup guna menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

7. ASRI

upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota sehingga dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan, kesan, dan asri dan lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusia.



Gambar 1.1. Konsep Pengembangan *Smart City* Kabupaten Bantul

Sumber: Hasil analisis, 2023

1.2 Analisis Kondisi Eksternal

Faktor eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan program *Smart City* di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap kondisi eksternal yang dapat berdampak secara positif maupun potensial menghambat implementasi *Smart City* di Kabupaten Bantul. Proses analisis kondisi eksternal ini dilakukan dengan mempertimbangkan enam aspek yang relevan, yaitu: analisis tren pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta aspek hukum dan regulasi (*law/legal*).

1.2.1 Analisis Tren Pembangunan Politik

Pengawasan dan pengembangan aspek politik di wilayah Kabupaten Bantul merupakan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan pengawasan dan pengembangan aspek politik bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan sosial politik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ranah politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum. Merujuk pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) Tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 80,32%. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pemilihan presiden (PILPRES) Tahun 2019 yang mencapai 87,9%. Penurunan tersebut terkait dengan penyelenggaraan PILKADA yang berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19 (RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026).

Tabel 1.2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PDI Perjuangan	10	1	11
Partai Gerindra	7	1	8
Partai Amanat Nasional	4	1	5

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Partai Golongan Karya	4	1	5
Partai Kebangkitan Bangsa	6	-	6
Partai Keadilan Sejahtera	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan	2	-	2
Partai Nasional Demokrat	1	-	1
Partai Demokrat	2	-	2
Partai Bulan Bintang	1	-	1
Jumlah/Total	41	4	45

Sumber: BPS, 2023

Secara keseluruhan, terdapat 10 partai politik yang menduduki anggota DPR di Kabupaten Bantul. Merujuk pada Tabel 1.2. menunjukkan bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut partai politik didominasi dengan anggota DPR laki-laki dibandingkan perempuan. Dari 45 anggota DPR, partai politik PDI Perjuangan masih mendominasi kursi DPR yaitu sejumlah 11 anggota. Berbeda dengan Partai Bulan Bintang yang memiliki 1 anggota di DPR.

1.2.2 Analisis Tren Pembangunan Ekonomi

Analisis tren pembangunan ekonomi salah satunya dapat dianalisis berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul. Secara umum, nilai PDRB per kapita Bantul atas dasar harga berlaku periode Tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,23 juta rupiah dan Tahun 2022 mencapai 30,79 juta rupiah (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Bantul dari waktu ke waktu. Pengaruh tren pembangunan ekonomi di Kabupaten yaitu adanya pengaruh inflasi dan potensi sektor ekonomi kreatif Kabupaten Bantul.

Selama tahun 2022, terdapat 13 (tiga belas) kategori yang tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya dan terdapat 4 (empat) kategori yang tumbuh melambat. Tiga belas kategori yang tumbuh lebih cepat daripada tahun sebelumnya secara berurutan adalah kategori Transportasi dan Pergudangan, kategori Jasa Lainnya, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori Listrik dan Gas, kategori Jasa Perusahaan, kategori Jasa Perusahaan, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Kendaraan Bermotor, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, kategori Industri Pengolahan, kategori *Real Estate*, dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta kategori Pertambangan dan Penggalian. Adapun empat kategori yang tumbuh melambat adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, kategori Konstruksi, kategori Informasi dan Komunikasi, serta kategori Jasa Pendidikan (BPS, 2022).

Adanya penguatan pada kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bantul mendorong pertumbuhan tiga kategori yang tumbuh cepat, seperti: kategori transportasi dan pergudangan, kategori jasa lainnya dan kategori penyediaan makan dan minum. Selain itu, pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2022 dipercepat dengan membaiknya perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Program percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022-2025 dengan menerapkan pola hidup baru yakni "*Living with Endemic*". Adanya perubahan perilaku masyarakat setelah adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi percepatan laju pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi di beberapa lapangan usaha, salah satunya adalah kategori Informasi dan Komunikasi.

Lebih jauh, industri kreatif dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bantul selain pertanian dan pariwisata. Kabupaten Bantul memiliki beragam industri, seperti: industri kerajinan di mana sebanyak 70% produk kerajinan di DIY berasal dari Kabupaten Bantul, mulai dari sentra keramik, kerajinan kulit, asesoris keris, batik, kerajinan bambu, kayu batik, dan lain-lain (DPMPTSP, 2023). Selain itu, merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, industri kreatif ditetapkan sebagai prioritas di Kabupaten Bantul.

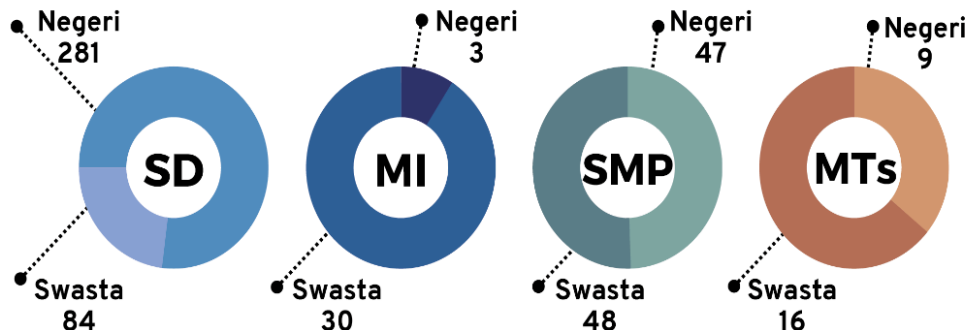
1.2.3 Analisis Tren Pembangunan Sosial

Tren pembangunan sosial Kabupaten Bantul mencakup berbagai perubahan dan perkembangan dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan, kemiskinan, pendidikan, dan berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya. Secara umum, kondisi sosial masyarakat tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang berdampak kepada berbagai aspek mulai ekonomi, kesehatan, bahkan sampai pada masalah kerawanan sosial. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebesar 13,5% naik sebesar 0,58% dari Tahun 2019.

Berbeda dengan permasalahan kemiskinan, adanya potensi sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan tren perkembangan sosial di Kabupaten Bantul. Merujuk pada Gambar 1.2, menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) telah tersedia di Kabupaten Bantul. Selain itu, posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga Kota Yogyakarta memberikan salah satu manfaat khususnya dalam kemudahan akses pendidikan Perguruan Tinggi (PT) masyarakat di Kabupaten Bantul.

DATA PENDIDIKAN

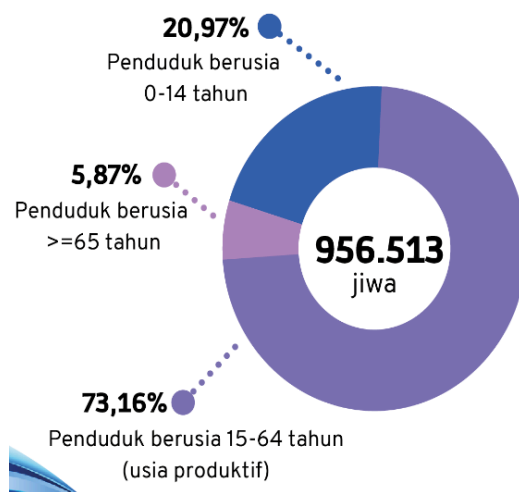
Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 2021



Gambar 1.2 Data Pendidikan Kabupaten Bantul

Sumber: Pemerintah Kab. Bantul, 2023

Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki potensi pemuda sebagai sumber daya penting untuk dapat dioptimalkan guna mendukung mempercepat program pembangunan. Merujuk pada nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Bantul sebesar 80,69. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup baik.



Gambar 1.3. Data Pendidikan Kabupaten Bantul

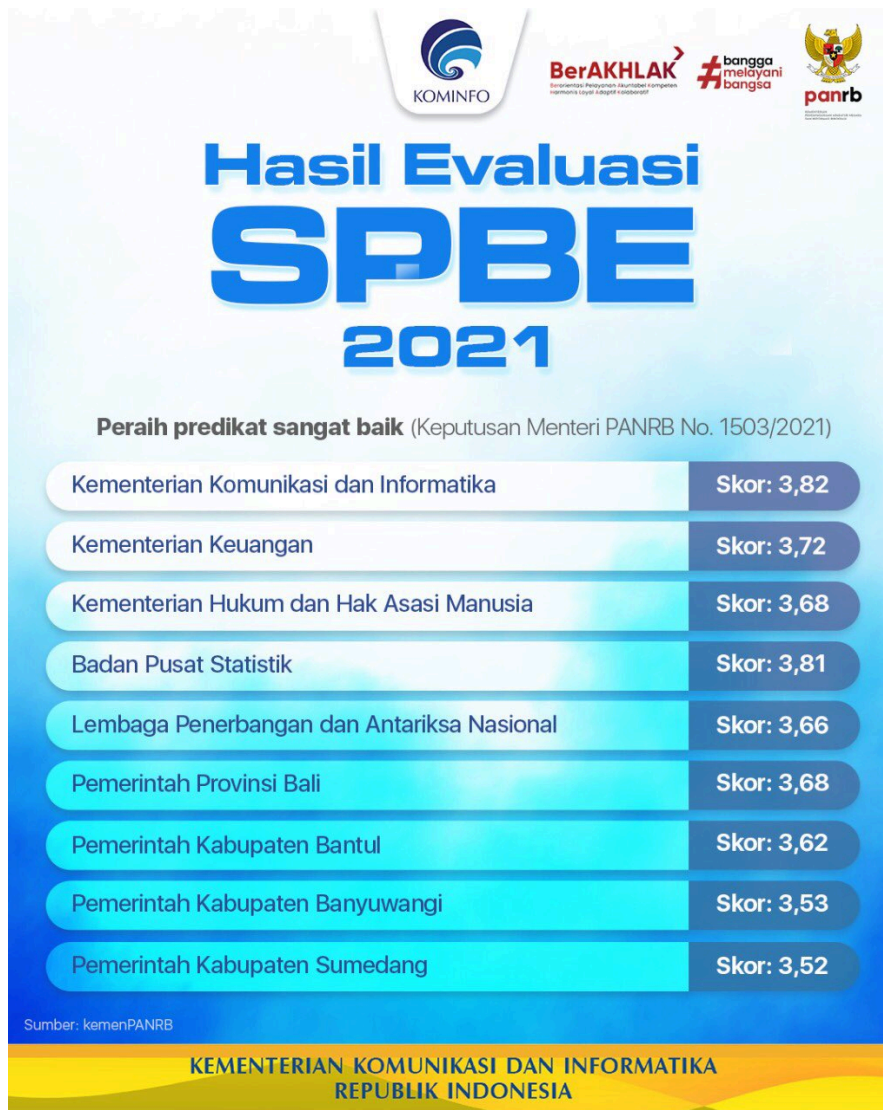
Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023

1.2.4 Analisis Tren Pembangunan Teknologi

Transformasi digital menjadi salah satu tren pembangunan dalam bidang teknologi. Transformasi digital di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah proses pembangunan dan penggunaan teknologi di bidang informasi maupun komunikasi. Transformasi digital merupakan sebuah gerakan yang mengadopsi teknologi digital dan melibatkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat inovasi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memberikan kemudahan kepada atau dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah. Lebih jauh, transformasi digital tidak hanya melibatkan implementasi perangkat lunak atau perangkat keras baru, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat tentunya membawa perubahan masif pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Adapun beberapa contoh tren perkembangan teknologi ke depan, seperti: teknologi digital (internet seluler, otomatisasi, dan *cloud technology*), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (*IoT*, transportasi dan distribusi, *additive manufacturing/3D printing*, dan *nano technology*), teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomassa, dan *geothermal*), dan teknologi kesehatan (genetika, pengobatan dan pemulihan, serta pelayanan kesehatan). Secara umum, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan respon yang positif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dalam berbagai pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pemerintahan di Bantul.

Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul meraih peringkat 1 untuk SPBE tingkat Kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bantul, telah berhasil mencapai prestasi yang terbaik, diantara kabupaten di Indonesia. Tidak hanya itu, adanya komitmen Kabupaten Bantul untuk menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahan terus diupayakan melalui berbagai aspek seperti implementasi *Smart City* dan berbagai upaya penguatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 1.4. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

Sumber: Kementerian Kominfo RI, 2021

1.2.5 Analisis Tren Pembangunan Lingkungan

Tren pembangunan lingkungan mengacu pada perubahan signifikan dalam pendekatan dan praktik pembangunan yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan alam dan manusia. Analisis tren pembangunan lingkungan di Kabupaten Bantul dapat dilihat berdasarkan berbagai aspek, seperti: konservasi air, pengelolaan limbah, dan berbagai upaya yang diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Posisi Kabupaten Bantul yang berada dibagian hilir, menjadikan kabupaten ini dilewati 5 (lima) sungai besar, yaitu: Sungai Bedog, Winongo, Code, Gajah Wong dan Opak

(RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026). Keberadaan sungai di Kabupaten Bantul pada hakikatnya dapat dioptimalkan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Namun demikian, kurangnya kesadaran masyarakat menjadikan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bantul disalahgunakan sebagai tempat pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/industri yang menjadi sumber pencemaran.

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup daerah diukur melalui peningkatan pengelolaan sampah dengan mengedepankan aspek pengurangan dan penanganan. Salah satu inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “KOLABORASI PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU BANTUL BERSIH SAMPAH 2025 (BANTUL BERSAMA)”. Kegiatan inovasi tersebut diwujudkan melalui beberapa upaya dan langkah, yaitu:

1. Membangkitkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
2. Peningkatan peran dan kapasitas Kelompok Pengelola Sampah (BUMKal, TPS 3R dan Pelanggan Sampah);
3. Penyusunan dan Penetapan Regulasi Operasional Terkait Pengelolaan Sampah; dan
4. Pembangunan Fasilitas Dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (Pembangunan *Intermediate Treatment Facility*/ITF).



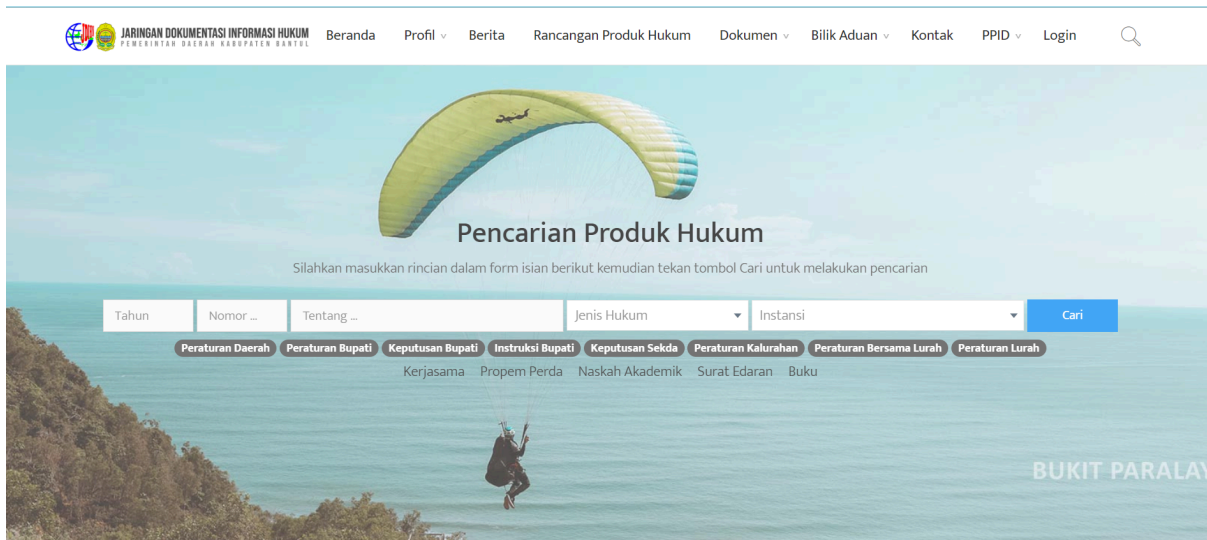
Gambar 1.5. Logo Bantul Bersama

Secara umum, pembangunan lingkungan menjadi salah satu aspek dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Merujuk pada SDGs, terdapat beberapa tujuan yang mengarah kepada pembangunan lingkungan berkelanjutan, yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, dan penanganan perubahan iklim. Lebih jauh, lingkungan yang sehat dan berkelanjutan sangat penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS). SDGS menjadi serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.

1.2.6 Analisis Tren Pembangunan *Law/Legal*

Tren dalam bidang hukum terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan masyarakat. Tidak terkecuali, perkembangan hukum di Kabupaten Bantul. Tren pembangunan hukum yang ada di Kabupaten Bantul menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat dan daerah. Berbagai produk hukum, seperti: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan Sekda, Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, dan Peraturan Lurah.

Seluruh produk hukum di Kabupaten Bantul telah tersedia dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Secara umum, JDIH merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk mengelola dokumen-dokumen hukum. Melalui sistem JDIH, dokumen-dokumen hukum ini dapat diakses oleh masyarakat umum secara *online*. Tujuannya adalah memberikan transparansi, memudahkan akses informasi hukum, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Dengan menggunakan sistem JDIH, pemerintah dapat menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat dengan lebih efisien dan cepat.



Gambar 1.6. Website JDIIH Kabupaten Bantul

Sumber: <https://jdih.bantulkab.go.id/>

Sejak Tahun 1980 sampai saat ini, produk hukum yang telah diterbitkan berjumlah 5.778 produk hukum. Merujuk pada Gambar 1.7, Keputusan Bupati menjadi produk hukum yang paling banyak dikeluarkan sebesar 54,50% atau sejumlah 3.149 produk hukum, Peraturan Bupati sebesar 23,54% atau 1.360 produk hukum, dan peraturan daerah sebesar 7,18% atau 415 produk hukum. Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum di Pemerintah Kabupaten Bantul adaptif dan menyesuaikan dengan perkembangan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan masyarakat.



Gambar 1.7 Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Jenisnya

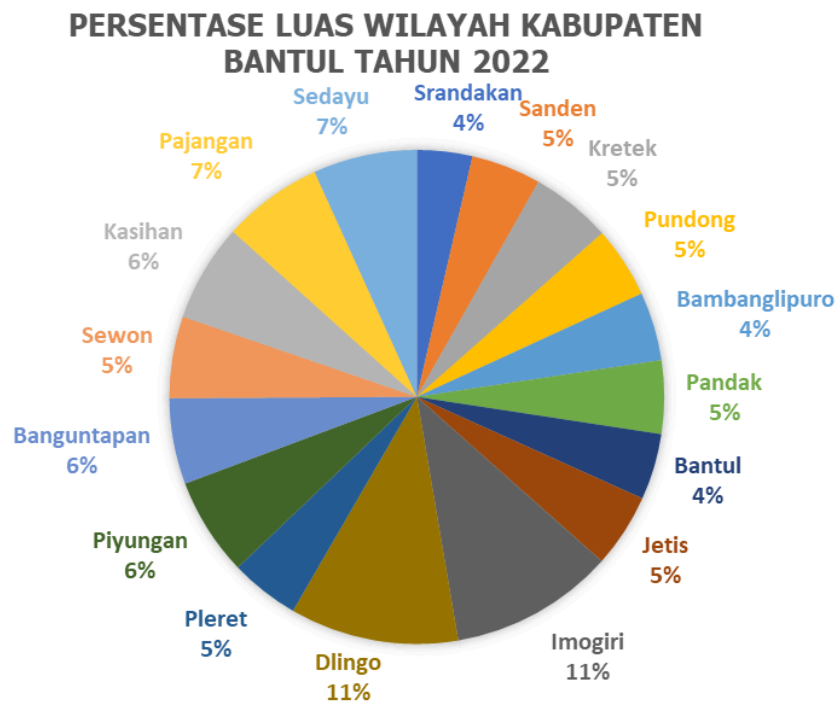
Sumber: <https://jdih.bantulkab.go.id/>

BAB II ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Keberhasilan implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul tidak terlepas dari adanya analisis kesiapan daerah. Analisis kesiapan daerah merupakan komponen penting dalam konsep *Smart City*. Aspek-aspek utama dalam kesiapan ini meliputi potensi alam, struktur daerah, infrastruktur, suprastruktur, dan budaya.

2.1 *Nature*

Kabupaten Bantul terletak di antara koordinat 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan. Secara umum, Kabupaten Bantul terdiri 17 kapanewon, dimana Kapanewon Dlingo dan Imogiri memiliki luas mencapai 11% yaitu Kapanewon Dlingo sebesar 55,87 km² dan Kapanewon Imogiri seluas 54,49 km². Sedangkan kapanewon dengan persentase luas wilayah terkecil berada di Kapanewon Srandakan yaitu sebesar 18,32 km², Kapanewon Bantul sebesar 21,95 km² dan Kapanewon Bambanglipuro sebesar 22,7 km².

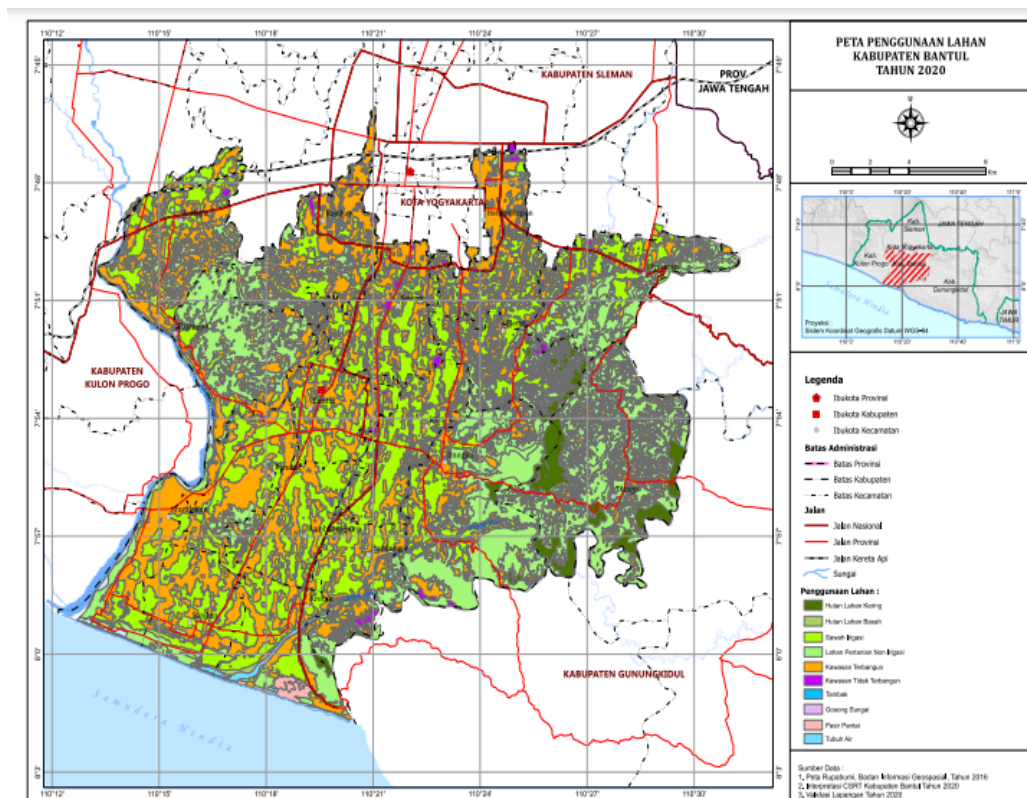


Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2022

Sumber: BPS, 2023

Dari perspektif topografi, Kabupaten Bantul dapat terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: dataran tengah yang terletak di pusat, daerah perbukitan yang membentang di bagian timur dan barat, serta zona pesisir yang terletak di sisi selatan. Topografi yang unik di Kabupaten Bantul menunjukkan pola yang menarik dengan ciri-ciri yang cenderung membujur dari utara ke selatan. Lebih lanjut, wilayah Kabupaten Bantul melintasi berbagai sungai, baik yang memiliki aliran besar maupun yang lebih kecil. Secara geostrategis, Kabupaten Bantul memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi Kabupaten Bantul yang terletak di bagian hilir atau muara aliran sungai di sebelah selatan memberikan keuntungan signifikan dalam memastikan pasokan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air.

Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul dapat dikelompokkan ke dalam berbagai klasifikasi penggunaan lahan sesuai dengan standar SNI 7645-1:2014. Adapun peta penggunaan lahan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul
Sumber: RPJMD Kab. Bantul Tahun 2021-2026

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dicermati bahwa pemanfaatan lahan perkotaan dan lahan pertanian irigasi secara dominan terletak di wilayah pusat yang membentang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan hasil dari tingkat kesuburan tanah yang tinggi di kawasan ini, yang juga menjadi pendorong signifikan bagi perkembangan perkotaan. Di sisi lain, wilayah timur cenderung digunakan untuk pertanian non irigasi dan belum banyak memiliki perkembangan perkotaan. Karena itu, diperlukan kebijakan regional yang mendukung distribusi perkembangan perkotaan yang lebih merata, untuk menghindari konsentrasi yang berlebihan di wilayah tengah.

Potensi perkembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat ditemukan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Rencana tata ruang ini bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian Kabupaten Bantul dengan berfokus pada sektor pertanian sebagai landasan ekonomi utama, didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, jasa, serta perikanan dan kelautan, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

2.2 Struktur

Analisis kesiapan struktur Kabupaten Bantul dapat diidentifikasi berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan birokrasi, dan kemampuan anggaran. Adapun secara detail, hasil analisis sebagai berikut.

2.2.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk sebesar 1.013.170 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.998,95 km² (BPS Kab. Bantul, 2023). Merujuk pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kapanewon Banguntapan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 127.029 jiwa. Secara umum, Kapanewon Banguntapan termasuk kedalam kawasan sub *urban* Kawasan Perkotaan Yogyakarta sehingga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Berbeda dengan Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Pajangan memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 2,17. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh perkembangan

kawasan Kota Yogyakarta sebagai pusat ibukota Provinsi DIY yang telah mengalami pelebaran ke wilayah – wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kapanewon	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km²)
Srandakan	31.424	1,36	3,10	1.715,28
Sanden	31.596	1,09	3,12	1.364,25
Kretek	30.917	1,06	3,05	1.154,91
Pundong	36.146	1,67	3,57	1.526,44
Bambanglipuro	42.012	1,55	4,15	1.850,75
Pandak	52.904	1,43	5,22	2.177,12
Bantul	66.182	1,48	6,53	3.015,13
Jetis	60.559	1,84	5,98	2.474,83
Imogiri	64.683	1,73	6,38	1.187,06
Dlingo	40.030	1,56	3,95	716,48
Pleret	51.820	2,06	5,11	2.255,99
Piyungan	56.108	1,75	5,54	1.724,28
Banguntapan	127.029	1,05	12,54	4.460,29
Sewon	111.713	1,14	11,03	4.113,14
Kasihan	117.287	1,04	11,58	3.622,21

Kapanewon	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
Pajangan	39.866	2,17	3,93	1.198,98
Sedayu	52.894	2,01	5,22	1.539,41
Bantul	1.013.170	1,45	100	1.998,95

Sumber: BPS, 2023

Lebih jauh, berdasarkan proporsi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Bantul Tahun 2022 didominasi dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 50,24%, dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 49,76%. Berdasarkan pada kelompok umur, Kabupaten Bantul didominasi dengan kelompok usia sekolah dan produktif. Merujuk pada Tabel 2.2, menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi bonus demografi dimana kelompok umur muda <15 tahun memiliki jumlah lebih dari 70.000 jiwa.

Tabel 2.2. Proporsi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 4	36.068	34.772	70.840
5 - 9	35.808	34.196	70.004
10 - 14	36.322	34.486	70.808
15 - 19	36.719	34.982	71.701
20 - 24	36.368	36.394	72.762
25 - 29	36.809	37.277	74.086
30 - 34	38.927	38.619	77.546
35 - 39	38.131	37.951	76.082
40 - 44	37.615	37.094	74.709

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
45 - 49	34.959	35.460	70.419
50 - 54	33.513	34.382	67.895
55 - 59	30.902	31.974	62.876
60 - 64	25.824	26.887	52.711
65 - 69	18.772	19.586	38.358
70 - 74	12.557	14.544	27.101
75 +	14.839	20.433	35.272
Jumlah	504.133	509.037	1.013.170

Sumber: BPS, 2023

Secara umum, jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70-74 tahun sekitar 27.101 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling banyak terdapat pada kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah penduduk 74.709 jiwa. Kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul dapat dianalisis berdasarkan jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan. Persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Bantul diatas 90%. Persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja paling banyak adalah masyarakat yang menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi (PT) yaitu sekitar 99,08%. Hal ini menunjukkan bahwa keterserapan penduduk di Kabupaten Bantul sudah cukup baik. Secara keseluruhan, sampai Tahun 2023, terdapat 21 Perguruan Tinggi (PT) yang berada di Kabupaten Bantul yaitu: Institut Seni Indonesia, UMY, UPY, UMBY, Institut Teknologi Yogyakarta, STTKD, STIKes AKBIDYO, Akademi Teknik Piri, STIE "YKP" Yogyakarta, Universitas Alma Ata Yogyakarta, ITDA Yogyakarta, STIKIP Catur Sakti Yogyakarta, UTDI, Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, Akademi Bahasa Asing Yappinddo, Akademi Bahasa Asing YIPK, Akademi Desain Visi Yogyakarta, ISTEK Mulia, POLTEKKES UMMI KHASANAH, Akademi Keperawatan Al-Islam Yogyakarta, STIKES Bethesda Yakkum.

Tabel 2.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan kerja		
Sekolah Dasar (SD)	131.213	10.040	141.253	70.206	92,89
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	122.688	3.916	126.604	52.671	96,91
Sekolah Menengah Atas (SMA)	244.267	9.960	254.227	71.528	96,08
Perguruan Tinggi (PT)	103.240	959	104.199	21.251	99,08

Sumber: BPS, 2023

Lebih jauh, untuk mengukur tingkat partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pendidikan formal dapat dianalisis berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berdasarkan Tabel 2.4, menunjukkan bahwa APM dan APK Kabupaten Bantul memiliki nilai sebanding dimana didominasi dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Semakin tinggi APM dan APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
Sekolah Dasar (SD)/MI/ sederajat	99,79	102,85
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs/ sederajat	86,20	90,30
Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA/ sederajat	74,67	88,95

Sumber: BPS, 2023

Secara keseluruhan, analisis kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul ditinjau berdasarkan jumlah penduduk, laju pertumbuhan, persentase penduduk, kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan bahwa adanya potensi sumber daya manusia dalam mengimplementasikan dan mengembangkan *Smart City*. Semakin baik pendidikan penduduk di suatu wilayah, maka memiliki potensi sumber daya manusia yang lebih baik.

Tabel 2.5. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/kreatif di daerah	52		v	
2	Adanya perguruan tinggi di daerah	21	v		
3	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	0			v
4	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	0	v		
5	Jumlah angka kriminalitas dalam satu	1	v		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	tahun				
6	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	0	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada tabel analisis kualitas SDM menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kemampuan SDM yang diwujudkan dari berbagai kesiapan SDM Masyarakat dalam mengimplementasikan *Smart City* Kabupaten Bantul. Hal ini diwujudkan dengan jumlah komunitas dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bantul, tidak adanya tindakan pelanggaran ketertiban umum dan kegiatan tawuran kelompok warga dalam satu tahun, serta angka kriminalitas yang cenderung rendah.

2.2.2 Kemampuan Birokrasi

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 sebanyak 7.074 orang atau berkurang sebanyak 341 orang dibandingkan Tahun 2021 (BPS, 2023). Penurunan jumlah pegawai disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan PNS yang masuk masa pensiun dan meninggal dunia. Merujuk pada Tabel 2.6, menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul memiliki tingkat pendidikan yang beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Strata 3 (S3) dan didominasi oleh tingkat sarjana sebanyak 3.794 PNS (53.63%), Diploma III (D-III) sebanyak 1.135 PNS (16.04%), dan SLTA sebanyak 967 (13.67%). Sedangkan, untuk PNS dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S3) memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu 10 orang (0.14%). Distribusi jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	24	0.4

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
2	SLTP	95	1.3
3	SLTA	967	13.67
4	Diploma I (D I)	21	0.29
5	Diploma II (D II)	125	1.77
6	Diploma III (D III)	1.135	16.04
7	Diploma IV (D IV)	180	2,54
8	Strata 1 (S 1)	3.794	53.63
9	Strata 2 (S 2)	723	10.22
10	Strata 3 (S 3)	10	0.14
Total		7.074	100

Sumber: BPS, 2023

Merujuk pada Tabel 2.7, menunjukkan bahwa dari 7.074 PNS di Kabupaten Bantul terdiri dari 2.528 laki-laki dan 4.546 perempuan. Sebanyak 64.26% PNS di Kabupaten Bantul adalah perempuan dimana 68.08% berpendidikan sarjana. Lebih jauh, terdapat 82.35% PNS di Kabupaten Bantul yang menduduki posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah laki-laki, 65.81% PNS Kabupaten Bantul yang menduduki posisi Administrator adalah laki-laki, dan 47.57% PNS di Kabupaten Bantul yang menduduki posisi pengawas adalah laki-laki. Adapun jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Jabatan	2022		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28	6	34
Administrator	102	53	155
Pengawas	138	152	290
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru	690	1.924	2.614
Jabatan Fungsional Medis	184	950	1.134
Jabatan Fungsional Teknis	193	210	403
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	1.193	1.251	2.444
Jumlah	2.528	4.546	7.074

Sumber: BPS, 2023

Tingkat kemampuan birokrasi setiap daerah bervariasi, seperti: tingkat korupsi, kualitas pendidikan, kebijakan manajemen sumber daya manusia, serta

budaya dan norma-norma organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan birokrasi. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam sistem birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara efisien dan efektif.

Tabel 2.8. Analisis Kualitas SDM Pemda

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	9.78%		v	
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	64		v	
3	Jumlah relawan TIK di daerah	52 KIM	v		
4	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	35.81%		v	
5	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	25.33%		v	
6	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	38.89%		v	
7	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	159	v		
8	Persentase ketersediaan jaringan <i>broadband access</i> terhadap jumlah kantor pemerintahan	100%	v		
9	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	67%		v	
10	Jumlah lokasi <i>wireless internet (hotspot)</i> di kawasan perkantoran pemerintahan	45		v	
11	Ketersediaan data <i>center</i> (baik yang dikelola sendiri maupun <i>manage service</i>) untuk kepentingan pemerintahan	1	v		
12	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Ada, di ISO	v		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
13	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang <i>interoperable</i>	9	v		
14	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang <i>interoperable</i>	9	v		
15	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang <i>interoperable</i>	Ada	v		
16	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang <i>interoperable</i>	2	v		
17	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang <i>interoperable</i>	Ada	v		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang <i>interoperable</i>	Ada	v		
19	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang <i>interoperable</i>	1	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada tabel analisis kualitas SDM Pemda menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kemampuan birokrasi yang diwujudkan dari berbagai kesiapan SDM Pemda dalam mengimplementasikan *Smart City* Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari persentase pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika, persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai, jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah (*e-lapkin*, Aplikasi Pengajuan PAK dan PKG, SAPA ASN, *e-Presensi*, Sistem Informasi Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai, SIMANJA BETUL, dan lain sebagainya), jaringan *broadband access* di seluruh kantor pemerintahan, jumlah ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan (Kapanewon = 17 titik, Kalurahan = 75 titik, Puskesmas = 27 titik, Pusat Kesehatan Hewan = 1 titik, UPT = 34 titik, SD dan SMP = 38 titik, Padukuhan = 23 titik, Instansi Lain, Pasar dan Desa Wisata = 37 titik), terdapat 32 titik wifi, adanya *data*

center yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, serta terdapatnya berbagai sistem informasi yang mendukung proses birokrasi di Kabupaten Bantul.

2.2.3 Kemampuan Anggaran

Kemampuan anggaran Kabupaten Bantul dapat terlihat dari realisasi pendapatan. Merujuk pada Tabel 2.9, menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp. 540.572,42 nilai ini lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 491.670,72. Berbagai jenis pemasukan yang tergolong pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain. Dari keseluruhan jenis tersebut nilai yang berkontribusi paling besar yaitu berasal dari pajak daerah yang menyumbang hampir 46,77% total pendapatan asli daerah. Selain PAD terdapat jenis pendapatan lain seperti dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah. Tiga komponen tersebut kemudian diakumulasikan menjadi total pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan jenis pendapatan, kontribusi terbesar pendapatan yang ada berasal dari dana perimbangan, dengan nilai mencapai Rp. 1.283.444,32 pada Tahun 2022. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Tabel 2.9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul menurut Jenis Pendapatan Tahun 2021-2022

Jenis Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	491.670,72	540.572,42
Pajak Daerah	203.758,21	252.857,44
Retribusi Daerah	27.767,87	42.178,62
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.053,29	20.839,92

Jenis Pendapatan	Tahun 2021	Tahun 2022
Lain-lain PAD yang Sah	240.091,35	224.696,44
Dana Penimbangan	1.254.511,87	1.283.444,32
Bagi Hasil Pajak	41.290,85	34.759,24
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.740,31	2.004,92
Dana Alokasi Umum	911.168,11	902.030,73
Dana Alokasi Khusus	300.312,60	344.649,44
Lain-lain Pendapatan yang Sah	87.823,37	7.967,28
Pendapatan Hibah	6.167,26	6.725,00
Dana Darurat	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	163.305,28	192.023,34
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	98.621,77	50.762,75
Lainnya	-	1.242,28
Jumlah	2.235.655,70	2.234.584,50

Sumber: BPS, 2023

Lebih lanjut, berdasarkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 lebih besar dibandingkan pengeluaran Tahun 2021 dengan selisih pengeluaran

sebesar Rp. 19.893,38. Pengeluaran terbesar terdapat pada belanja operasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 1.695.584,35. Jenis pengeluaran paling kecil pada Tahun 2022 berupa belanja tak terduga sebesar Rp. 19.683,70. Adapun secara lebih rinci realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dapat terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) Tahun 2021-2022

Jenis Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja Operasi	1.670.457,25	1.695.584,35
Belanja Pegawai	894.085,18	853.342,37
Belanja Barang dan Jasa	713.169,22	768.495,41
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	60.212,34	65.636,17
Belanja Bantuan Sosial	2.990,50	8.110,40
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
Belanja Modal	274.194,65	221.698,42
Belanja Tanah	38.174,50	8.247,99
Belanja Peralatan dan Mesin	70.145,84	70.206,00
Belanja Gedung dan Bangunan	43.667,94	37.780,80
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	110.699,13	98.155,32
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.464,69	7.308,31
Belanja Aset Lainnya	42,55	-

Jenis Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2022
Belanja Tak Terduga	26.690,98	19.683,70
Transfer	255.245,40	309.515,18
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	26.103,40	26.103,40
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	22.191,23	22.191,23
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.912,17	3.912,17
Transfer Bantuan Keuangan	3.912,17	283.411,79
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	92,32	99,71
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	229.049,68	229.049,68
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
Jumlah Belanja dan Transfer	2.226.588,27	2.246.481,65

Sumber: BPS, 2023

Adapun secara detail, tingkat kemampuan anggaran Kabupaten Bantul dapat dianalisis sebagai berikut.

Tabel 2.11. Analisis Keuangan Kabupaten Bantul

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	24.06%		v	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	0%	v		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 2023	38.16%		v	
4	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2023	930.698.769.673	v		
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja <i>Smart City</i> yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2024	Rp.84.637.925.143,00	v		
6	Jumlah program pembangunan untuk mendukung <i>Smart City</i> di daerah Tahun 2023	125	v		
7	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	Rp.2.193.856.422.696,05	v		
8	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung <i>Smart City</i>	Rp.104.845.417.328,00	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada tabel analisis keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi kemampuan anggaran yang diwujudkan dari berbagai kesiapan anggaran Pemda dalam mengimplementasikan *Smart City* Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari adanya jumlah anggaran untuk belanja *Smart City* yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2023 dan 2024, jumlah program pembangunan untuk mendukung *Smart City* di daerah Tahun 2023 (125 program *Smart City*), adanya investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah, dan adanya sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung *Smart City* di Kabupaten Bantul.

2.3 Infrastruktur

Analisis kesiapan infrastruktur Kabupaten Bantul dapat diidentifikasi berdasarkan kesiapan infrastruktur fisik, digital dan sosial. Adapun secara detail, hasil analisis sebagai berikut.

2.3.1 Fisik

Secara umum, kondisi infrastruktur fisik Kabupaten Bantul sudah cukup baik, dimana berdasarkan jenis permukaan, seluruh panjang jalan di Kabupaten Bantul merupakan jalan beraspal (624,47 km). Kondisi jalan yang baik selaras dengan aksesibilitas wilayah. Aksesibilitas wilayah merujuk pada kemudahan orang, barang, atau informasi. Aksesibilitas memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan wilayah, karena akses yang baik ke suatu wilayah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah. Kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Aspal	624,47	624,47	624,47
Kerikil	-	-	-
Tanah	-	-	-
Lainnya	-	-	-
Total	624,47	624,47	624,47

Sumber: BPS, 2023

Lebih jauh, berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa 44.59% atau 278,47 km termasuk dalam kondisi jalan baik, 31.24% atau 195,10 km masuk kedalam kondisi jalan sedang, 17.32% atau 108,13 termasuk dalam kondisi jalan rusak, dan 6.85% atau 42,77 termasuk dalam kondisi rusak berat. Sejalan dengan jenis permukaan jalan, kondisi jalan di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan memiliki kondisi yang cukup baik. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2022

Kondisi Jalan	Tahun		
	2020	2021	2022
Baik	265,33	283,74	278,47
Sedang	205,67	188,75	195,10
Rusak	101,99	108,51	108,13
Rusak Berat	51,48	43,47	42,77
Total	624,47	624,47	624,47

Sumber : BPS, 2023

Merujuk pada Tabel 2.14., menunjukkan bahwa jumlah fasilitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bantul sudah merata tersebar di seluruh kapanewon, kecuali Kapanewon Pandak yang belum memiliki fasilitas SMA. Berdasarkan jenis fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas pendidikan TK di Kabupaten Bantul memiliki jumlah yang paling banyak sebesar 468 unit, SD sebanyak 367 unit, SMP sebanyak 95 unit, SMK sebanyak 46 unit, dan SMA sebanyak 37 unit. Kesiapan infrastruktur fisik pendidikan secara tidak langsung berpengaruh dalam kemudahan akses pendidikan masyarakat. Kesiapan infrastruktur fisik pendidikan juga perlu dipertimbangkan bersamaan dengan kesiapan tenaga pendidik dan kurikulum yang relevan. Adapun secara lebih detail, dapat terlihat pada tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Jumlah Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bantul

Tahun 2022/2023

Kapanewon	Jenis Fasilitas				
	Taman Kanak-Kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Srandakan	21	15	3	1	3
Sanden	25	16	5	1	2
Kretek	18	15	4	1	2
Pundong	22	17	3	1	1
Bambanglipuro	25	17	8	3	2
Pandak	37	25	6	-	2
Bantul	37	27	10	6	8
Jetis	27	21	5	1	2
Imogiri	33	22	5	2	2
Dlingo	17	22	7	1	2
Pleret	22	19	4	2	1
Piyungan	33	21	4	2	4
Banguntapan	58	32	8	3	1
Sewon	39	28	8	4	6
Kasihan	51	34	8	4	5

Kapanewon	Jenis Fasilitas				
	Taman Kanak-Kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Pajangan	17	12	3	1	1
Sedayu	32	24	4	4	2
Jumlah	468	367	95	37	46

Sumber: BPS, 2023

Selain fasilitas pendidikan, aspek kesiapan infrastruktur kesehatan juga menjadi salah satu aspek penting. Merujuk pada Tabel 2.14, menunjukkan bahwa apotek telah tersebar di seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Secara umum, terdapat 61 apotek, 47 puskesmas pembantu, 41 poliklinik, 27 puskesmas, dan 16 rumah sakit umum. Kelengkapan fasilitas infrastruktur kesehatan menjadi salah satu indikator kemudahan dalam memberikan layanan kesehatan yang efektif. Infrastruktur fisik kesehatan mencakup fasilitas medis, rumah sakit, puskesmas, apotek, dan fasilitas kesehatan lainnya. Data ini ditunjukkan pada Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kapanewon	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	Rumah Sakit Umum	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Srandakan	-	1	1	1	1
Sanden	1	1	1	3	3

Kapanewon	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	Rumah Sakit Umum	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Kretek	-	1	1	4	3
Pundong	-	-	1	-	3
Bambanglipuro	2	2	1	3	2
Pandak	1	2	2	2	4
Bantul	3	5	2	4	5
Jetis	2	3	2	3	4
Imogiri	-	2	2	3	5
Dlingo	-	4	2	3	4
Pleret	1	1	1	5	4
Piyungan	-	2	1	2	3
Banguntapan	3	5	3	4	6
Sewon	3	4	2	4	4
Kasihani	-	4	2	2	4
Pajangan	-	3	1	1	3
Sedayu	-	1	2	3	3
Jumlah	16	41	27	47	61

Sumber: BPS, 2023

Tingkat kesiapan infrastruktur di Kabupaten Bantul secara fisik sudah cukup baik. Kesiapan infrastruktur fisik tidak hanya mencakup keberadaan fasilitas, tetapi juga ketersediaan peralatan dan tenaga pendukung lainnya. Kesiapan infrastruktur fisik memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan daerah. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Datanya dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Analisis Infrastruktur Fisik Kabupaten Bantul

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	624.47		v	
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	13.300 m/ jalan beraspal		v	
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	8.357	v		
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	4,348	v		
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	2	v		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	125	v		
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	1.971	v		
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	93.33%	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

2.3.2 Digital

Kesiapan infrastruktur digital adalah faktor kunci dalam pengembangan daerah pada era digital. Infrastruktur digital mencakup jaringan internet, perangkat keras dan perangkat lunak, serta aplikasi dan layanan digital yang mendukung akses informasi, inovasi, dan interaksi *online*. Merujuk pada Tabel 2.16, menunjukkan bahwa terdapat 58 titik lokasi *wifi* yang ada di Kabupaten Bantul yang tersebar di seluruh

kapanewon. Jumlah lokasi *wifi* terbanyak ditemukan di Kapanewon Bantul, sedangkan pada Kapanewon Jetis tidak ditemukan *wifi*. Adapun secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.17..

Tabel 2.17. Titik Lokasi *Wifi* di Kabupaten Bantul

Kapanewon	Jenis Fasilitas
Srandakan	2
Sanden	3
Kretek	4
Pundong	2
Bambanglipuro	2
Pandak	4
Bantul	9
Jetis	-
Imogiri	5
Dlingo	4
Pleret	1
Piyungan	1
Banguntapan	5
Sewon	4
Kasihan	4
Pajangan	3

Kapanewon	Jenis Fasilitas
Sedayu	5
Jumlah	58

Sumber: Kominfo Kabupaten Bantul, 2023

Kesiapan infrastruktur digital pada dasarnya tidak terlepas dari adanya kebutuhan listrik. Listrik menjadi kebutuhan dasar untuk menjalankan infrastruktur digital, sementara infrastruktur digital memungkinkan pengelolaan dan distribusi listrik yang lebih efisien. Secara umum, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Bantul sebanyak 360,992 atau sebesar 99,99%. Dengan membangun infrastruktur digital yang kokoh, daerah dapat meningkatkan daya saingnya, meningkatkan akses ke layanan penting, dan membuka peluang baru dalam perekonomian digital global.

Tabel 2.18. Analisis Infrastruktur Digital

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Tersedianya jaringan <i>broadband access</i> untuk masyarakat	164 KM	v		
2	Jumlah lokasi <i>wireless</i> untuk publik	58		v	
3	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	99.99%	v		
4	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	1	v		
5	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	563	v		
6	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/ <i>online</i>	16	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

2.3.3 Sosial

Infrastruktur sosial merujuk pada sejumlah fasilitas, layanan, dan sistem yang mendukung kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Bantul. Hal ini mencakup berbagai elemen yang memungkinkan interaksi dan keberlanjutan kehidupan sehari-hari. Secara umum, infrastruktur sosial berkontribusi pada kesejahteraan dan keamanan sosial. Merujuk pada Tabel 2.18., menunjukkan bahwa terdapat lima dari enam jenis tempat ibadah yang dapat ditemukan di Kabupaten Bantul. Adapun jenis tempat ibadah yang dapat ditemukan di Kabupaten Bantul antara lain yaitu Masjid (2.082 unit), Mushola (1.580 unit), Gereja Protestan (43 unit), Gereja Katolik (17 unit), dan Pura (4 unit). Dari 17 kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, Kapanewon Banguntapan memiliki tempat peribadatan paling banyak dan paling lengkap yaitu sejumlah 381. Adapun secara lebih detail dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 2. 19. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Srandakan	75	63	1	1	-	-
Sanden	94	57	-	-	-	-
Kretek	76	42	2	2	1	-
Pundong	93	13	2	1	-	-
Bambanglipuro	110	127	3	2	-	-
Pandak	95	85	3	2	-	-
Bantul	167	141	3	1	-	-
Jetis	138	124	3	-	-	-
Imogiri	131	61	2	1	-	-

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Dlingo	108	112	2	-	-	-
Pleret	69	152	-	-	-	-
Piyungan	118	87	2	1	-	-
Banguntapan	233	141	5	1	1	-
Sewon	158	64	2	1	1	-
Kasihani	236	77	6	1	1	-
Pajangan	75	141	1	1	-	-
Sedayu	106	93	6	2	-	-
Jumlah	2.082	1.580	43	17	4	-

Sumber: BPS, 2023

Kesiapan infrastruktur sosial pada dasarnya tidak terlepas dari adanya sarana prasarana pendukung kebutuhan dasar salah satunya tempat peribadatan. Selain itu, tersedianya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa, jumlah fasilitas olahraga dan ketersediaan perpustakaan umum menjadi salah satu potensi kesiapan penyediaan infrastruktur sosial dalam implementasi *Smart City*. Adapun secara lebih detail analisis infrastruktur sosial sebagai berikut.

Tabel 2.20. Analisis Infrastruktur Sosial

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	75	v		
2	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	83	v		
3	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	1	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

2.4 Suprastruktur

Analisis kesiapan suprastruktur Kabupaten Bantul dapat diidentifikasi berdasarkan kesiapan kebijakan dan kelembagaan. Adapun secara detail, hasil analisis sebagai berikut.

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan *Smart City* Kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk berbagai regulasi terkait penguatan implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul. Kebijakan *Smart City* menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberhasilan implementasi *Smart City*. Secara umum, terdapat 4 (empat) kebijakan *Smart City* di Kabupaten Bantul, antara lain yaitu:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 Tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan *Dewan Smart City* Kabupaten Bantul; dan

4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul *Smart City*.

Sebagai bentuk transparansi, berbagai kebijakan *Smart City* Kabupaten Bantul telah dipublikasikan melalui Bantul *Smart City*. Lebih jauh, bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul juga terwujud dari adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program *Smart City*, salah satunya melalui ASN Inovator. Melalui ASN Inovator, ASN yang dapat mencetuskan inovasi mendapatkan apresiasi Kartika Punggawa Projo Tamansari (KPP).



Gambar 2.3. ASN Inovator

Kesiapan suprastruktur daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan dan keberlanjutan yang berkelanjutan. Secara umum, analisis kebijakan dapat diidentifikasi berdasarkan ketersediaan regulasi pendukung implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul. Adapun secara lebih detail analisis kebijakan sebagai berikut.

Tabel 2.21. Analisis Kebijakan Kabupaten Bantul

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Peraturan Bupati tentang Masterplan <i>Smart City</i>	Peraturan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2021 tentang Master Plan <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	v		
2	Adanya Keputusan Bupati tentang Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Keputusan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	v		
3	Adanya Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul <i>Smart City</i>	v		
4	Adanya Masterplan <i>Smart City</i>	Ada	v		
5	Adanya visi pembangunan <i>Smart City</i> yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada	v		
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program <i>Smart City</i> dalam jangka panjang	Ada	v		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program <i>Smart City</i>	ASN Inovator	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

2.4.2 Kelembagaan

Keberhasilan implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa Dewan *Smart City* memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan kota melalui pendekatan inovatif. Hal ini juga memerlukan kerjasama yang erat dengan semua pihak terkait, termasuk entitas di luar lingkungan internal kota, serta penguatan peran daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi dan kerja sama.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam konteks ini dengan pembentukan Dewan *Smart City* Daerah dan Tim Pelaksana *Smart City*. Dalam struktur dewan dan tim pelaksana, terdapat perwakilan dari Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan dan pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Dalam pelaksanaan program *Smart City*, penting untuk memastikan bahwa setiap dimensi mendapatkan dukungan penuh dari Perangkat Daerah yang terkait.

Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul telah diatur dalam SK Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul. Secara umum, tim pelaksana memiliki tanggung jawab untuk merancang Masterplan *Smart City*, mengembangkan Program Percepatan *Smart City*, serta melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul. Keputusan yang diambil oleh Bupati Bantul dalam konteks ini memiliki dampak finansial yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Rincian keanggotaan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul dapat ditemukan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22. Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Bantul

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	Ketua I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan	

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
		Pembangunan Daerah	
3.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	Anggota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Panewu Sewon	
		Panewu Anom Piyungan	
		Panewu Anom Pleret	
		Panewu Anom Pandak	
		Panewu Anom Kretek	
		Panewu Anom Imogiri	
		Panewu Anom Sanden	
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Koordinator Kelompok			

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
		Substansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata Dinas Pariwisata	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi dan Pengolahan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Sub Koordinator Program dan Pelaporan Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Program Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda.Kabupaten Bantul	
		Sub Koordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda.Kabupaten Bantul	
		Sub Koordinator Kelompok	

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
		Substansi Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	
		Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Kasihan	
		Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Pundong	
		Unsur Inspektorat Daerah	
		Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	
		Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	
		Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Unsur Dinas Perhubungan	
		Unsur Dinas Kebudayaan	
		Unsur Dinas Lingkungan Hidup	
		Unsur Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
		Unsur Dinas Sosial	
		Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
		Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda	
		Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
		Unsur Bagian Hukum Setda	
		Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda	
		Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda	
		Unsur Kapanewon Sedayu	
		Unsur Kapanewon Jetis	
		Unsur Kapanewon Srandakan	
		Unsur Kapanewon Pajangan	
		Unsur Kapanewon Bambanglipuro	
		Unsur Kapanewon Dlingo	
		Unsur Kapanewon Banguntapan	
		Unsur Perumda Air Minum Tirta Projomansari	
		Unsur Perumda Aneka Dharma	
		Unsur PT.Bank Bantul (Perseroda)	

Sumber : SK Bupati Nomor 108 Tahun 2022

Kesiapan kelembagaan daerah merujuk pada kemampuan dan kesiapan lembaga-lembaga pemerintahan di Kabupaten Bantul untuk mengelola, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan konsep *Smart City* Kabupaten Bantul. Faktor-faktor kesiapan kelembagaan daerah melibatkan struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Adapun secara lebih detail analisis kelembagaan Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 2.23. Analisis Kelembagaan Kabupaten Bantul

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan <i>Smart City</i> Daerah	Keputusan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 410 tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	v		
2	Adanya Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Daerah	Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul <i>Smart City</i>	v		
3	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana <i>Smart City</i> di setiap OPD	<ul style="list-style-type: none"> • Tercantum dalam susunan personalia tim pelaksana pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantul <i>Smart City</i> • Keputusan Bupati Bantul Nomor 727 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 475 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul • Keputusan Bupati Bantul Nomor 70 	v		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
		Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023			

Sumber: Hasil analisis, 2023

2.5 Culture

Analisis kesiapan budaya melibatkan penilaian terhadap bagaimana nilai-nilai, norma, dan sikap dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi atau mendukung inisiatif atau perubahan tertentu, khususnya dalam pembangunan *Smart City*. Kesiapan budaya mencakup pemahaman terhadap bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap perubahan, terutama yang melibatkan teknologi, inovasi, dan konsep-konsep baru. Merujuk pada Tabel 2.24., menunjukkan bahwa berdasarkan kegiatan, jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul mencapai 191 kelompok organisasi. Jumlah organisasi masyarakat masih menjadi organisasi yang paling banyak terbentuk yaitu sebanyak 114 organisasi. Dari 191 organisasi, jumlah organisasi paling banyak ditemukan di Kapanewon Bantul sebanyak 60 organisasi dan Kapanewon Banguntapan sebanyak 31 organisasi.

Tabel 2.24. Jumlah Organisasi Masyarakat Menurut Bidang Kegiatan Tahun 2022

Kapanewon	Jenis Organisasi					
	Politik	Keagamaan	Pendidikan	Pemuda	Masyarakat	Profesi
Srandakan	-	-	1	-	-	-
Sanden	1	3	2	-	6	-
Kretek	-	-	-	-	6	-
Pundong	-	1	-	-	1	-

Kapanewon	Jenis Organisasi					
	Politik	Keagamaan	Pendidikan	Pemuda	Masyarakat	Profesi
Bambanglipuro	-	1	1	-	2	-
Pandak	-	-	-	-	8	-
Bantul	1	28	2	1	27	1
Jetis	-	-	2	-	5	-
Imogiri	-	-	1	-	-	-
Dlingo	-	-	-	-	-	1
Pleret	-	-	1	-	-	-
Piyungan	-	2	-	-	1	-
Banguntapan	-	-	20	-	11	-
Sewon	-	1	-	-	18	-
Kasihani	-	1	3	-	18	1
Pajangan	-	-	1	-	4	-
Sedayu	-	-	-	-	7	-
Jumlah	2	37	34	1	114	3

Sumber: BPS. 2023

Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki 6 (enam) forum swadaya masyarakat pendukung *Smart City*, yaitu Forum Perguruan Tinggi, Forum Satu Data Indonesia, Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (Forkom KIM), Forum Pelaku Wisata, Forum Komunikasi Netizen Bantul, dan Forum Pewarta. Kesiapan *culture*

menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki potensi dalam penguatan budaya dan kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul. Adapun komponen kesiapan *culture* Kabupaten Bantul melibatkan lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, forum swadaya pendukung *Smart City*, dan partisipasi pakar perguruan tinggi. Adapun secara lebih detail analisis kelembagaan Kabupaten Bantul ditampilkan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. Analisis Organisasi Masyarakat

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	66	v		
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	2		v	
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung <i>Smart City</i>	6	v		
4	Jumlah forum pendukung <i>Smart City</i> yang memiliki sekretariat definitif	5	v		
5	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan <i>Smart City</i>	3	v		

Sumber: Hasil analisis, 2023

BAB III ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Analisis strategi merupakan aspek penting dalam mewujudkan *Smart City* Kabupaten Bantul. Analisis ini berguna dalam menentukan langkah dan tindakan dalam penyusunan program, rencana dan strategi lebih lanjut kedepannya. Adapun analisis strategi pembangunan *Smart City* terdiri dari analisis GAP, analisis SWOT, dan Analisis TOWS untuk keenam dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Pada dasarnya ketiga analisis yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul.

3.1 Analisis GAP

Analisis GAP adalah metode analisis evaluasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan potensi optimalnya. Tujuan analisis GAP adalah untuk mengidentifikasi perbedaan atau "celah" (*gap*) antara keadaan yang seharusnya dan keadaan yang sebenarnya. Analisis GAP bermanfaat untuk membantu pemerintah menganalisis aspek mana saja yang perlu dilakukan perubahan atau meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. Secara umum, analisis GAP *Smart City* dianalisis berdasarkan masing-masing dimensi. Adapun hasil analisis GAP *Smart City* Bantul sebagai berikut.

Tabel 3.1 Analisis GAP

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
Smart Governance	Adanya <i>Super Apps</i> Bantul yaitu Bantulpedia	Perkembangan revolusi TIK dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Optimalisasi integrasi berbagai sistem layanan publik yang sudah ada di Kabupaten Bantul dan <i>single window</i> yang

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
			mudah dimanfaatkan
	Terbatasnya SDM TIK (Beban kerja ASN lebih besar dibandingkan jumlah pegawai)	Digitalisasi pelayanan pemerintah	Pembangunan <i>knowledge base management system</i>
	Tersedianya produk hukum sebagai dasar implementasi <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	Keberhasilan implementasi <i>Smart City</i> Kabupaten Bantul	Optimalisasi berbagai payung hukum dalam pelaksanaan <i>Smart City</i>
Smart Branding	Potensi pariwisata Kabupaten Bantul	Pembangunan pariwisata yang <i>sustainable</i>	Meningkatnya kesadaran dan mendorong minat dalam pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.
	Posisi strategis Kabupaten Bantul	<i>Platform</i> dan ekosistem perdagangan digital	Peningkatan adopsi teknologi digital dalam bisnis lokal
	Adanya semboyan Kabupaten Bantul “Projotamansari”	Implementasi semboyan “Projotamansari” kedalam seluruh dimensi <i>Smart City</i>	Penyusunan program <i>Smart City</i> yang selaras dengan “Projotamansari”
Smart Economy	Banyaknya UMKM dan industri kreatif	UMKM <i>Go Digital</i>	Pelatihan UMKM dalam pemasaran produk UMKM dan industri kreatif

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
	Pengangguran cukup tinggi	Penguatan sistem perlindungan sosial dan ekonomi inklusif	Peningkatan upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
	Sebagian masyarakat masih menggunakan sistem pembayaran tunai	Terciptanya budaya penggunaan transaksi non tunai	Optimalisasi <i>cashless payment</i>
Smart Living	Ketimpangan infrastruktur wilayah	Ketersediaan infrastruktur digital yang mendukung penerapan <i>Smart City</i>	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur digital
	Penanganan masalah kesehatan belum optimal	Sistem informasi kesehatan yang terpadu dan terintegrasi	Pembangunan <i>platform</i> sistem informasi kesehatan yang terpadu dan terintegrasi
	Prevensi masyarakat yang lebih senang menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum	Sistem IoT dalam bidang transportasi	Manajemen layanan transportasi
Smart Society	Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Pertumbuhan penduduk yang terintegrasi dengan	Optimalisasi ruang-ruang publik guna memfasilitasi

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
		kemajuan dan pembangunan wilayah di Kabupaten Bantul	komunitas masyarakat
	Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang belum kompetitif	Sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif	Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pembinaan
	Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah	Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan	Pembentukan kelompok Satgas dalam melindungi masyarakat
Smart Environment	Kualitas lingkungan hidup	Adanya teknologi pengelolaan lingkungan	Penggunaan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan
	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Kebijakan dan program terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	Penyusunan berbagai kebijakan dan program inovatif dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengelolaan energi terbarukan di Kabupaten Bantul	Energi terbarukan	Inovasi dalam teknologi energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil analisis menunjukkan perbedaan atau kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan atau diinginkan sehingga dapat dianalisis ketidaksesuaian atau kekurangan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan di masa depan. Merujuk pada pada Tabel 3.1, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Bantul telah memiliki komitmen dalam mengimplementasikan *Smart City*. Hal ini terbukti dari berbagai upaya yang telah dilakukan pada masing-masing dimensi *Smart City* untuk mencapai kondisi ideal. Analisis gap berperan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga terwujudnya Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul.

3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu teknik analisis perencanaan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang dapat berpengaruh terhadap implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul. Analisis SWOT dalam *Smart City* bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi yang diperlukan dalam mengimplementasikan *Smart City* Kabupaten Bantul. Secara umum analisis SWOT dapat dianalisis berdasarkan masing-masing dimensi yang dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Analisis SWOT *Smart Governance*

Secara umum, sasaran dari *Smart Governance* adalah untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Analisis *SWOT* dalam *Smart Governance* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri dari pelayanan publik (*public service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan perancangan kebijakan (*public policy*). Adapun hasil analisis *SWOT Smart Governance* sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Analisis SWOT *Smart Governance*

	Kekuatan	Kelemahan
	Kinerja aparatur yang meningkat	Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang belum ramah difabel
	Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Belum adanya SOP implementasi <i>Smart City</i>
	Adanya <i>Super Apps</i> Bantul yaitu Bantulpedia	Terbatasnya SDM TIK
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Kemajuan Teknologi Informasi	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, serta penyediaan kebutuhan masyarakat khususnya dalam mengakses pelayanan publik
Sinergitas perangkat daerah	Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Pembuatan SOP bersama pada Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik yang sama
Komitmen Kepala Daerah	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah	Optimalisasi penggunaan teknologi untuk akses layanan dasar
Inovasi perangkat daerah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Efisiensi dan penyederhanaan prosedur birokrasi pelayanan	Mempermudah akses pelayanan publik
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Keamanan data/ <i>cyber security</i>	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi	Menyusun kebijakan regulasi peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik.
Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah	Penetapan peta jalan pengembangan layanan publik yang berbasis TIK	Menyusun regulasi tentang penggunaan data dan keamanan data. Optimalisasi sistem informasi pemerintah dalam bentuk <i>website</i> maupun aplikasi

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada Tabel 3.2., menunjukkan bahwa diperlukan berbagai strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantul. Mengadopsi sistem informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, memastikan ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses, meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik menjadi strategi yang dapat diterapkan di Kabupaten Bantul. Selain itu, menyusun kebijakan regulasi peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik juga menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantul. Serangkaian strategi dan kebijakan tersebut digunakan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

3.2.2 Analisis SWOT *Smart Branding*

Secara umum, sasaran dari *Smart Branding* adalah untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Bantul dengan penataan wajah kabupaten dan pemasaran potensi kabupaten baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Analisis *SWOT* dalam *Smart Branding* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri dari pariwisata (*tourism*), ekosistem bisnis (*business*), dan wajah kota (*city appearance*). Adapun hasil analisis *SWOT Smart Branding* sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Analisis SWOT *Smart Branding*

	Kekuatan	Kelemahan
	Banyaknya destinasi wisata	Rendahnya daya tarik destinasi wisata
	Adanya <i>platform</i> promosi destinasi wisata	Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata
	Banyaknya objek wisata potensial di Kabupaten Bantul	Terbatasnya kreativitas masyarakat Kab. Bantul dalam pengelolaan produk lokal
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Inovasi pengembangan daya tarik wisata	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan bisnis lokal	Optimalisasi promosi wisata melalui berbagai <i>platform</i>
Pembangunan Kawasan Jalur Jalan Lintas	<i>Mapping</i> area destinasi wisata berdasarkan pasar	Menyusun paket <i>bundling</i> wisata di Kabupaten Bantul

Selatan	wisatawan	
Adanya potensi pengembangan pariwisata bahari	Kerjasama dengan Pemprov dalam promosi destinasi wisata di Kab. Bantul	Penguatan kelompok pokdarwis
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Persaingan destinasi wisata antar Kabupaten/Kota	Mempermudah pengurusan izin usaha pariwisata	Optimalisasi potensi wisata dengan mengembangkan berbagai atraksi pada destinasi wisata
Belum adanya ciri khas potensi lokal di Kab. Bantul sehingga adanya kecenderungan kesamaan potensi lokal antar daerah	Pengembangan konsep <i>one village one product</i>	<i>Piloting project</i> untuk pembangunan <i>smart village</i>
Potensi bencana alam yang ada di pesisir Pantai Selatan	Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	Pengembangan objek wisata Pantai Selatan sesuai dengan rencana tata ruang daerah

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada Tabel 3.3., menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pariwisata Kabupaten Bantul diperlukan strategi yang terencana dengan baik. Adapun beberapa strategi yang dapat diimplementasikan, yaitu: Diversifikasi produk pariwisata, termasuk pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan wisata kuliner, serta menyesuaikan produk pariwisata dengan minat dan kebutuhan pasar (*mapping area destinasi*). Selain itu, diperlukan upaya untuk pengembangan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif, termasuk pemanfaatan media sosial, *website* resmi, dan kampanye promosi, memberikan pelatihan kepada pelaku pariwisata lokal, termasuk pelatihan keterampilan layanan, dan manajemen destinasi, membangun *platform* digital untuk wisata, serta menerapkan teknologi seperti *Augmented Reality (AR)* atau *Virtual Reality (VR)* untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Lebih jauh, diperlukan fasilitas pendukung bagi sektor-sektor kunci, termasuk kawasan industri dan teknologi, serta menyediakan insentif bagi investor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bantul.

3.2.3 Analisis SWOT *Smart Economy*

Secara umum, sasaran dari *Smart Economy* adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Analisis *SWOT* dalam *Smart Economy* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri dari industri yang berdaya saing (*industry*), kesejahteraan rakyat (*Welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*). Adapun hasil analisis *SWOT Smart Economy* sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Analisis SWOT *Smart Economy*

	Kekuatan	Kelemahan
	Banyaknya UKM dan industri kreatif	Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah
	Keanekaragaman kuliner	Pengangguran cukup tinggi
	Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi	Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat
	Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha	Proporsi pasar dengan <i>type A</i> masih rendah
	Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat	
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Pengembangan kawasan peruntukan industri	Meningkatkan pertumbuhan industri	Meningkatkan kualitas UMKM
Keanekaragaman pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura
Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif
Keberadaan Bandara	Memper memudahkan investasi dalam	Pengembangan aplikasi <i>mobile</i> dan <i>platform</i> digital yang

YIA	berbagai bidang	memfasilitasi transaksi keuangan yang mudah, cepat, dan aman.
	Pengembangan potensi desa	
	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Pengentasan Kemiskinan
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Pandemi yang menghambat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran
Tingginya alih fungsi lahan pertanian	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas
Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan	Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif	Membangun ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bantul
		Meningkatkan ketahanan pangan

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada Tabel 3.4., menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Kabupaten Bantul diperlukan diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti: industri kreatif, teknologi, dan ekowisata, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan memberikan fasilitas, pelatihan, dan dukungan finansial, mendorong modernisasi pertanian dengan memperkenalkan teknologi dan praktik pertanian yang lebih efisien, dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura. Selain itu, diperlukan dukungan kepada UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, menyediakan tenaga kerja yang kompetitif, serta menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dapat diidentifikasi strategi yang diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di Kabupaten Bantul.

3.2.4 Analisis SWOT *Smart Living*

Secara umum, sasaran dari *Smart Living* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Analisis *SWOT* dalam *Smart Living* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri dari harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*), kesehatan (*Health*) dan transportasi (*Mobility*). Adapun hasil analisis *SWOT Smart Living* sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Analisis SWOT *Smart Living*

	Kekuatan	Kelemahan
	Adanya Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadai
	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang memadai	Ketimpangan infrastruktur wilayah
	Fasilitas sarana prasarana transportasi publik yang memadai	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang)
	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%
		Masih cukup tingginya jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis
		Penanganan masalah kesehatan belum optimal
		Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik
		Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (1.45% tahun 2022)
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Kebijakan pengembangan Kawasan Selatan DIY	Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan Kawasan Selatan	Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif
Integrasi sistem informasi layanan kesehatan yang efektif	Membudayakan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul

dan efisien		
Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi	
Keberadaan Bandara YIA	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan layanan transportasi berbagi dalam satu <i>platform</i>
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Peningkatan urbanisasi yang berdampak pada munculnya permukiman kumuh	Optimalisasi program penanganan RTLH	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Prevensi masyarakat yang lebih senang menggunakan transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum	Penyusunan kebijakan manajemen transportasi	Penyediaan transportasi yang aman dan nyaman

Sumber: Hasil analisis, 2023

Merujuk pada Tabel 3.5., mewujudkan permukiman yang layak huni di Kabupaten Bantul melibatkan berbagai aspek, termasuk infrastruktur perumahan, akses ke layanan dasar, layanan kesehatan dan pengelolaan transportasi. Adapun berbagai strategi yang mendukung terwujudnya *Smart Living* antara lain yaitu: mengembangkan program perumahan subsidi untuk membantu masyarakat dengan pendapatan rendah mendapatkan hunian yang layak, melakukan penataan ruang yang terencana untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas umum, seperti: sekolah, pusat kesehatan, dan area rekreasi. Selain itu, perlunya dorongan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan dengan mempertahankan karakteristik budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kualitas fasilitas umum, seperti: taman, lapangan olahraga, dan pusat kegiatan masyarakat. Lebih jauh, dalam bidang transportasi diperlukan penyusunan kebijakan manajemen transportasi khususnya dalam pengelolaan transportasi di Kabupaten Bantul. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dapat diidentifikasi strategi yang diperlukan dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di Kabupaten Bantul.

3.2.5 Analisis SWOT *Smart Society*

Secara umum, sasaran dari *Smart Society* adalah untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Analisis SWOT dalam *Smart Society* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Tabel 3. 6 Analisis SWOT *Smart Society*

	Kekuatan	Kelemahan
	Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Produk dan SDM Bantul belum kompetitif
	Banyaknya kelompok seni budaya	Kualitas pendidikan belum merata
	Kuatnya tradisi/adat istiadat	Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah
	Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah
	Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul	Nilai-nilai luhur budaya daerah mulai hilang
		Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat
		Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda
		Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
		Pelatihan masyarakat dalam peningkatan keterampilan

Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda	Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas pemuda
Tingginya laju urbanisasi		Meningkatkan prestasi olahraga
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Kebutuhan pengembangan layanan dan sarana prasarana infrastruktur wilayah	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Sumber: Hasil analisis, 2023

Hasil analisis *SWOT* dalam dimensi *Smart Society* di Kabupaten Bantul telah mengidentifikasi sejumlah strategi yang perlu diadopsi. Mewujudkan masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif di Kabupaten Bantul tentu memerlukan serangkaian strategi yang mencakup pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan keterampilan sosial. Adapun beberapa strategi yang mendukung *Smart Society* yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital, meningkatkan kesadaran akan kewirausahaan dan memberikan dukungan kepada wirausahawan lokal, dan mendorong literasi digital dan teknologi di kalangan masyarakat.

3.2.6 Analisis SWOT *Smart Environment*

Secara umum, sasaran dari *Smart Environment* adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Analisis *SWOT* dalam *Smart Environment* mencakup tiga sub dimensi yang terdiri proteksi lingkungan

(*protection*), tata kelola sampah dan limbah (*waste*), dan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (*energy*).

Tabel 3. 7 Analisis SWOT *Smart Environment*

	Kekuatan	Kelemahan
	Ketersediaan RTH	Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik
	Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%
	Kebijakan dan program terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Inovasi pengelolaan sampah	Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumberdaya ekonomi dan energi terbarukan	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Potensi lahan yang dapat dijadikan sebagai TPS	Optimalisasi gerakan terpadu cinta sampah	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Penurunan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
Kurangnya kepedulian masyarakat terkait pengelolaan sampah dan limbah	Implementasi Kampung Bijak Sampah	Diseminasi dampak pencemaran lingkungan
Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY	Menggiatkan program bank sampah	Optimalisasi penggunaan energi terbarukan

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, sejumlah strategi telah diidentifikasi dalam dimensi *Smart Environment* di Kabupaten Bantul. Adapun beberapa strategi yang mendukung *Smart Environment* yaitu menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efisien, termasuk daur ulang dan pengelolaan limbah organik, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah di tingkat

rumah tangga, dan menyelenggarakan pelatihan dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya dalam mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti: tenaga surya dan tenaga angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

3.3 Analisis TOWS

Analisis TOWS (*threats, opportunities, weaknesses, strengths*) dalam *Smart City* merupakan perluasan dari analisis SWOT yang lebih menekankan pada faktor-faktor eksternal dengan cara yang lebih sistematis. Dalam analisis TOWS, fokus utamanya adalah pada pengembangan strategi yang memanfaatkan potensi eksternal. Secara umum analisis TOWS dapat dianalisis berdasarkan masing-masing dimensi yang dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Governance*

Analisis TOWS dalam mengimplementasikan *Smart Governance* mengacu pada optimalisasi peluang kerjasama dengan pihak eksternal dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tata kelola pemerintah. Adapun analisis TOWS *Smart Governance* sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Analisis TOWS *Smart Governance*

	Kekuatan	Kelemahan
	Ketersediaan jaringan telekomunikasi	Kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi di kalangan aparaturn pemerintah
	Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi	Kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat
	Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah	Keterbatasan anggaran untuk investasi dalam teknologi dan infrastruktur <i>smart governance</i>
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Kemajuan Teknologi Informasi	Memanfaatkan kekuatan dalam teknologi dan SDM untuk	Kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pemanfaatan

	mengoptimalkan peluang kolaborasi dengan sektor swasta.	teknologi informasi untuk akses layanan dasar
Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan solusi <i>Smart Governance</i>	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam efisiensi dan penyederhanaan prosedur birokrasi pelayanan	Memfaatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program <i>smart governance</i> dan meningkatkan kesadaran teknologi.
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah	Mengatasi keterbatasan anggaran dengan mencari sumber pendanaan alternatif atau kemitraan dengan sektor swasta.
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Keamanan data/ <i>cyber security</i>	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan keamanan siber.	Menyusun regulasi tentang penggunaan data dan keamanan data.
Potensi resistensi dari pihak-pihak yang kurang ingin berubah dalam implementasi <i>Smart Governance</i>	Memfaatkan kekuatan dalam partisipasi masyarakat untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan	Mengatasi kekurangan kesadaran dan keterampilan teknologi dengan melibatkan program pelatihan dan edukasi melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi Optimalisasi sistem informasi kebijakan pemerintah dalam bentuk <i>website</i> maupun aplikasi
Persaingan dengan kabupaten/kota lain dalam pengembangan <i>Smart Governance</i>	Pengembangan sistem informasi dan aplikasi layanan publik Kabupaten Bantul	Mengatasi keterbatasan infrastruktur digital untuk menghadapi ancaman persaingan dengan daerah lain.

Sumber: Hasil analisis, 2023

Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu strategi yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan tata kelola pemerintah di Kabupaten Bantul. Lebih jauh, diperlukan kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk akses layanan dasar, mengatasi keterbatasan anggaran dengan mencari sumber pendanaan alternatif atau kemitraan dengan sektor swasta, dan menyusun regulasi tentang penggunaan data dan keamanan data.

Selain itu, adanya kemitraan yang kuat antara sektor publik, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat mempermudah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta dalam mengembangkan program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai pemerintah atau masyarakat melalui skema kerjasama. Keberhasilan strategi ini tentu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, sehingga diperlukan kerjasama dan sinergitas dalam mengimplementasikan strategi *Smart Governance*.

3.3.2 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Branding*

Analisis *TOWS Smart Branding* ditunjukkan pada Tabel 3.9 membantu pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul untuk merancang strategi *Smart Branding* yang komprehensif, mengintegrasikan kekuatan dan peluang dengan kelemahan dan ancaman khususnya dalam pemasaran pariwisata, peningkatan daya saing, dan wajah Kabupaten Bantul. Adapun analisis *TOWS Smart Branding* sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Analisis *TOWS Smart Branding*

	Kekuatan	Kelemahan
	Keberagaman dan keindahan alam Kabupaten Bantul	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
	Adanya <i>platform</i> promosi destinasi wisata	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya <i>branding</i> untuk mempromosikan potensi Kabupaten Bantul
	Banyaknya objek wisata potensial di Kabupaten Bantul	Terbatasnya kreativitas masyarakat Kab. Bantul dalam pengelolaan produk lokal
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Inovasi pengembangan daya tarik wisata	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan promosi dan <i>branding</i>	Meningkatkan promosi dan pemasaran melalui investasi dalam strategi pemasaran yang efektif
Pengembangan ekowisata	Mengembangkan ekowisata sebagai respon terhadap tren keberlanjutan dan minat masyarakat terhadap alam.	Kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan paket <i>bundling</i> wisata di Kabupaten Bantul
Aksesibilitas Kabupaten	Kerjasama dengan Pemprov	Mengatasi kurangnya fasilitas

Bantul	dalam promosi destinasi wisata di Kab. Bantul	pariwisata dengan menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Ancaman dari persaingan dengan destinasi wisata lain yang mungkin memiliki strategi <i>branding</i> yang lebih kuat	Memanfaatkan potensi destinasi pariwisata untuk mendukung <i>branding</i> yang kuat	Bersiap menghadapi persaingan dengan destinasi lain dengan meningkatkan kualitas dan keunikan pengalaman wisata di Kabupaten Bantul.
Perubahan iklim dan bencana alam	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam perancangan konsep pariwisata yang berkelanjutan	Peningkatan kesadaran <i>branding</i> melalui kampanye edukasi dan program pelibatan masyarakat
Ancaman dari isu keamanan yang dapat menghambat kunjungan wisatawan	Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	

Sumber: Hasil analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis *TOWS*, sejumlah strategi telah disusun dalam kerangka dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Bantul. Guna meningkatkan promosi pariwisata, Kabupaten Bantul dapat mengajak *influencer* atau tokoh terkenal untuk mempromosikan pariwisata Bantul, selain itu perlunya membangun kemitraan dengan perusahaan pariwisata dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan promosi, dan menyelenggarakan acara bersama dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan daya tarik dan visibilitas potensi Kabupaten Bantul. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi salah kunci pengembangan dimensi *Smart Branding*. Implementasi strategi ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan peluang kesuksesan dan keberlanjutan industri pariwisata di Kabupaten Bantul.

3.3.3 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Economy*

Analisis *TOWS* dalam mengimplementasikan *Smart Economy* membantu pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul merumuskan strategi

pembangunan *Smart Economy* yang cerdas dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, serta mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul selama implementasi. Adapun analisis *TOWS Smart Economy* sebagai berikut.

Tabel 3.10 Analisis *TOWS Smart Economy*

	Kekuatan	Kelemahan
	Kabupaten Bantul memiliki potensi pertanian yang besar	Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian tanpa diversifikasi yang cukup
	Banyaknya UKM dan industri kreatif	Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah
	Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan potensi untuk pengembangan keterampilan di berbagai sektor ekonomi	Kurangnya keahlian teknologi di kalangan tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
		Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Pengembangan ekonomi digital	Meningkatkan pertumbuhan industri	Meningkatkan kualitas UMKM
Pengembangan kluster ekonomi yang berfokus pada keunggulan lokal	Mengoptimalkan potensi pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keahlian teknologi di kalangan tenaga kerja lokal
Partisipasi lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR	<i>Sharing</i> pendanaan dalam pengadaan teknologi pertanian	Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendukung
	Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Persaingan global	Mengembangkan keahlian di sektor ekonomi digital untuk menghadapi	Meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital untuk mengatasi persaingan global

	persaingan global	
Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan	Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan klaster ekonomi yang dapat menjadi tanggul melawan persaingan global
Ancaman dari perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dan keberlanjutan ekonomi lokal	Berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap krisis.	

Sumber: Hasil analisis, 2023

Kolaborasi dan kemitraan menjadi salah satu peluang dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul. Melalui kemitraan strategis dengan perusahaan swasta guna mendukung investasi dan pengembangan ekonomi lokal, serta mendorong inovasi dan riset bersama untuk meningkatkan daya saing menjadi salah satu strategi dimensi *Smart Economy*. Selain itu, perlunya upaya pemberdayaan kepada UMKM dengan memberikan pelatihan, adanya dukungan finansial, serta meningkatkan promosi dan fasilitasi investasi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif juga berpengaruh dalam keberhasilan implementasi *Smart City* khususnya pada dimensi *Smart Economy*. Secara umum, implementasi strategi-strategi ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dan kemampuan untuk merespons dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien. Dengan menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan, Kabupaten Bantul dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

3.3.4 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Living*

Analisis *TOWS* untuk *Smart Living* di Kabupaten Bantul melibatkan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi konsep *Smart Living*. Secara umum, analisis *TOWS* untuk *Smart Living* di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 3.11 Analisis TOWS Smart Living

	Kekuatan	Kelemahan
	Adopsi teknologi yang dapat mendukung <i>Smart Living</i>	Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadai
	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang memadai	Ketimpangan infrastruktur wilayah
	Fasilitas sarana prasarana transportasi publik yang memadai	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang)
	Ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan perumahan	Penanganan masalah kesehatan belum optimal
	Keberagaman budaya yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan permukiman yang inklusif dan beragam	Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
<i>Partnership</i> dengan sektor swasta	Kerjasama dengan pihak swasta dalam membangun kawasan permukiman yang mencerminkan identitas lokal.	Meningkatkan investasi dalam infrastruktur, terutama di sektor transportasi
Program perumahan subsidi	Optimalisasi program perumahan subsidi	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul
Integrasi sistem informasi layanan kesehatan yang efektif dan efisien	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun sistem informasi layanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi	
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Urbanisasi	Mengembangkan perumahan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam dan keberagaman budaya	Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait untuk menyusun kebijakan perumahan yang tangguh secara ekonomi.
Bencana alam	Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan solusi perumahan yang tahan bencana.	Mengembangkan perencanaan kota yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk mengatasi risiko bencana dan pertumbuhan penduduk yang cepat.

Sumber: Hasil analisis, 2023

Keberlanjutan program *Smart Living* tentu tidak terlepas dari adanya kerjasama dengan *stakeholder* dalam pembangunan lingkungan yang layak huni baik dari segi penataan ruang, pelayanan kesehatan, maupun aksesibilitas transportasi di Kabupaten Bantul. Dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk pengembangan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan, mendorong investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur perumahan, melakukan pemetaan risiko bencana untuk mengidentifikasi area-area yang rentan dan mengembangkan strategi mitigasi risiko bencana, kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun sistem informasi layanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi, serta meningkatkan investasi dalam infrastruktur, terutama di sektor transportasi menjadi strategi yang dapat diimplementasikan dalam mencapai sasaran *Smart Living*. Implementasi strategi ini memerlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus juga diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

3.3.5 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Society*

Analisis *TOWS Smart Society* merupakan sebuah *tools* analisis yang digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tatanan masyarakat dalam konsep *Smart Society* Kabupaten Bantul. Secara umum, analisis *TOWS* untuk *Smart Society* di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 3.12 Analisis *TOWS Smart Society*

	Kekuatan	Kelemahan
	Budaya partisipatif dan keaktifan masyarakat dalam kegiatan sosial.	Keterbatasan literasi digital di kalangan beberapa lapisan masyarakat.
	Kekayaan budaya yang dapat menjadi sumber inovasi dan daya tarik.	Kualitas pendidikan belum merata

	Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul	Disparitas ekonomi yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap teknologi.
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat	Mengoptimalkan budaya partisipatif dengan melibatkan masyarakat	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan literasi digital melalui program pelatihan dan pendidikan
Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mengoptimalkan keragaman budaya sebagai sumber inovasi	Kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang merata untuk memastikan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat
Pengembangan aplikasi berbasis lokal	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi berbasis lokal	Penggunaan teknologi konservasi digital untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas dokumen arsip
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Tingkat ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi	Penyediaan akses teknologi kepada masyarakat	Mendorong kemitraan dengan lembaga swasta untuk mengatasi disparitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi
Keamanan digital	Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital	Membangun program literasi digital yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi tetapi juga menyadarkan masyarakat tentang risiko keamanan digital

Sumber: Hasil analisis, 2023

Pembangunan komunitas di Kabupaten Bantul melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Guna mencapai sasaran *Smart Society* diperlukan berbagai strategi bersama, seperti: kerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan untuk memanfaatkan *platform* digital dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan dan komunikasi antar masyarakat, mendorong partisipasi dalam forum diskusi komunitas, membangun kemitraan dengan perusahaan dan sektor swasta dalam menciptakan inkubator bisnis dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi dan inovasi, serta mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung masyarakat lokal.

3.3.6 Analisis Kesenjangan terkait *Smart Environment*

Analisis *TOWS Smart Environment* Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 3.13 Analisis *TOWS* pada dimensi *Smart Environment* yang berfokus pada proteksi lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta tata kelola energi. Secara umum, analisis *TOWS* untuk *Smart Environment* di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 3.13 Analisis *TOWS Smart Environment*

	Kekuatan	Kelemahan
	Adanya ruang terbuka hijau dan keberagaman alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan	Capaian indikator lingkungan hidup belum baik
	Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%
	Kebijakan dan program terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	
Peluang	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
Inovasi pengelolaan sampah	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan inovasi pengolahan sampah	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan <i>platform</i> digital untuk memonitor dan mengelola lingkungan
Konservasi alam	Kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program konservasi lingkungan	Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan inisiatif energi terbarukan dan program efisiensi energi
Pengembangan energi terbarukan	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan potensi energi terbarukan	
Ancaman	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
Perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat	Menggandeng lembaga konservasi dan pemerintah untuk melindungi kawasan yang rawan terhadap perubahan iklim
Ekspansi perkotaan	Menerapkan program	Menyusun rencana tata ruang yang

yang tidak terkendali	konservasi alam yang melibatkan masyarakat untuk melawan ekspansi perkotaan yang tidak terkendali.	berkelanjutan untuk mengatasi ancaman ekspansi perkotaan yang merugikan lingkungan
Pencemaran lingkungan	Menggiatkan program bank sampah	

Sumber: Hasil analisis, 2023

Implementasi strategi dalam *Smart Environment* tentu memerlukan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik di Kabupaten Bantul. Pengelolaan tata kelola lingkungan mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, dan pemeliharaan keberlanjutan ekosistem. Adapun beberapa strategi *Smart City* dalam *Smart Environment*, yaitu: kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan inovasi pengolahan sampah, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan limbah industri, kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan *platform* digital untuk memonitor dan mengelola lingkungan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan inisiatif energi terbarukan dan program efisiensi energi, menggandeng lembaga konservasi dan pemerintah untuk melindungi kawasan yang rawan terhadap perubahan iklim, dan menerapkan program konservasi alam yang melibatkan masyarakat untuk melawan ekspansi perkotaan yang tidak terkendali.

BAB IV

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

Visi pembangunan *Smart City* pada Bab ini mencakup analisis visi, misi, dan sasaran *Smart City* yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bantul. Secara umum, analisis visi pembangunan *Smart City* dianalisis berdasarkan dari turunan visi misi dokumen perencanaan daerah. Adapun secara lebih detail visi, misi, dan sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul sebagai berikut.

4.1 Visi, Misi, *Smart City*

Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Bantul dianalisis berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Penyusunan visi misi *Smart City* Kabupaten Bantul diselaraskan dan mempertimbangkan pada kondisi wilayah, potensi, peluang, dan tantangan masa depan yang kemungkinan dihadapi oleh Kabupaten Bantul. Adapun Visi dan Misi yang akan dicapai demi mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Bantul yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Bantul yang *Smart*, Sehat, dan Sejahtera melalui Penguatan *Community Base*”

Secara eksplisit, terdapat 4 (empat) kata kunci yang terkandung dalam Visi *Smart City* Kabupaten Bantul yaitu:

- **Sehat:** Kabupaten Bantul diarahkan dapat berada pada kondisi optimal dari tubuh, pikiran, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.
- **Smart :** Kabupaten Bantul diarahkan untuk dapat adaptif dan inovatif dalam penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis pemerintah Kabupaten Bantul, dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- **Sejahtera :** Kabupaten Bantul diarahkan untuk mencapai kondisi atau keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok memiliki kehidupan yang nyaman, aman, dan makmur, termasuk ekonomi, sosial, fisik, dan psikologis.

- **Community Base:** Kabupaten Bantul diarahkan untuk dapat melibatkan masyarakat dan mengakui pentingnya partisipasi aktif, pengetahuan lokal, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program *Smart City*.

Berdasarkan visi *Smart City* Kabupaten Bantul, selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Adapun misi *Smart City* Kabupaten Bantul antara lain:

Misi 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui transformasi digital pelayanan publik yang integratif
Misi 2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing
Misi 3	Mewujudkan percepatan pengembangan ekonomi digital yang berbasis pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan penguatan peran UMKM
Misi 4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Misi 5	Membangun <i>city branding</i> Kabupaten Bantul sebagai kabupaten yang agamis, aman, dan harmonis

4.2 Sasaran *Smart City* Daerah

Sasaran *Smart City* Kabupaten Bantul merupakan turunan dari Visi Misi pembangunan sebagai alat ukur evaluasi pelaksanaan *Smart City*. Sasaran *Smart City* berisikan rangkaian indikator keberhasilan dari setiap dimensi yang ada. Untuk mempermudah realisasi pencapaian Visi Misi *Smart City*, sasaran terdiri dari dimensi, sub-dimensi, sasaran, dan dasar pemikiran yang tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan Dasar Pemikiran

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
<i>Smart Governance</i>	Layanan publik (<i>service</i>)	Mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan Teknologi Informasi (IT) yang memadai	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Birokrasi (<i>bureaucracy</i>)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi
	Perancangan kebijakan (<i>policy</i>)	Optimalisasi kebijakan Kabupaten Bantul	Persentase implementasi kebijakan Kabupaten Bantul
<i>Smart Branding</i>	Pariwisata (<i>tourism</i>)	Terwujudnya destinasi pariwisata dan budaya yang berdaya saing dan unggul	Cakupan peningkatan destinasi pariwisata
	Daya saing bisnis (<i>business</i>)	Peningkatan daya saing Kabupaten Bantul yang bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Wajah tampilan kota (<i>appearance</i>)	Mewujudkan Kabupaten Bantul menjadi muka atau wajah DIY	Jumlah kunjungan wisatawan
<i>Smart Economy</i>	Ekosistem industri (<i>industry</i>)	Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bantul	Laju pertumbuhan ekonomi
		Terwujudnya pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul	Rasio gini
		Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Capaian jaringan kabupaten kreatif
	Kesejahteraan masyarakat (<i>welfare</i>)	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Tingkat kemiskinan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	Ekosistem transaksi keuangan (<i>transaction</i>)	Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab	Opini BPK terhadap laporan keuangan
<i>Smart Living</i>	Harmonisasi tata ruang (<i>harmony</i>)	Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan	Indeks pembangunan infrastruktur
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	Kesehatan (<i>health</i>)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup
	Transportasi (<i>mobility</i>)	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat yang berkualitas	Indeks kualitas infrastruktur
<i>Smart Society</i>	Interaksi masyarakat (<i>community</i>)	Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Ekosistem belajar/pendidikan (<i>learning</i>)	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah
	Keamanan masyarakat (<i>security</i>)	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks risiko bencana
<i>Smart Environment</i>	Proteksi lingkungan (<i>protection</i>)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	Pengelolaan sampah dan limbah (<i>waste</i>)	Terwujudnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TP S3R.
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak
	Tata kelola energi (<i>energy</i>)	Penguatan upaya pencapaian ketersediaan energi	Persentase tingkat ketersediaan energi

Sumber: Hasil analisis, 2023

PENUTUP

Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Bantul dijadikan sebagai acuan dan bagi Pemerintah Daerah, tim eksekutif, pendamping, dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan pembangunan yang berorientasi pada berbagai aspek, seperti: arah perkembangan *Smart City*, strategi pengembangan *Smart City*, rencana tindakan untuk setiap dimensi *Smart City*, serta rencana perjalanan pembangunan *Smart City*. Keberhasilan implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul tidak terlepas dari perlunya kerjasama dan sinergitas antar berbagai *stakeholder* dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan *Smart City*. Adanya kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi pendorong percepatan implementasi *Smart City* Kabupaten Bantul.

REFERENSI

BPS Kabupaten Bantul, 2023

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

BPS. 2022. PDRB Kab. Bantul Tahun 2018-2022

DPMPTSP. 2023. Potensi Investasi.
https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/potensi_investasi/detail/24-sektor-perindustrian-dan-ekonomi-kreatif diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13.58 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bantul. 2023. Data Pendidikan.
https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000025/data-pendidikan.html diakses tanggal 10 Oktober 2023 pukul 14.22 WIB.

Kementerian Kominfo RI. 2021. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021.
<https://twitter.com/kemkominfo/> diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 15.48 WIB.



Pemerintah Kabupaten Bantul